



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024



BUPATI SAMBAS

WAKIL BUPATI SAMBAS

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS




KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Pemerintah Kabupaten Sambas telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024 yang merupakan salah satu bagian dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan tahun ketiga dan tahun terakhir periode Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2021-2026. Laporan ini merupakan sarana pelaporan yang menggambarkan pencapaian pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 yaitu *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan"*.

Laporan ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kepada berbagai pihak untuk dapat memberikan saran perbaikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk dijadikan bahan acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu dapat pula dijadikan bahan evaluasi yang objektif bagi pimpinan dalam rangka mengambil kebijakan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik.

Sambas, Maret 2025
BUPATI SAMPAS

SATONO, S.Sos.I., M.H.





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pembangunan Sambas No. 80 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392544 Fax. (0562) 392544 Pos-el. Inspektoratkab.sambas@gmail.com
Laman : <https://inspektorat.sambas.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sambas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sambas, Maret 2025

INSPEKTUR KABUPATEN SAMBAS,



H. BUDIMAN, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660815 199303 1 006



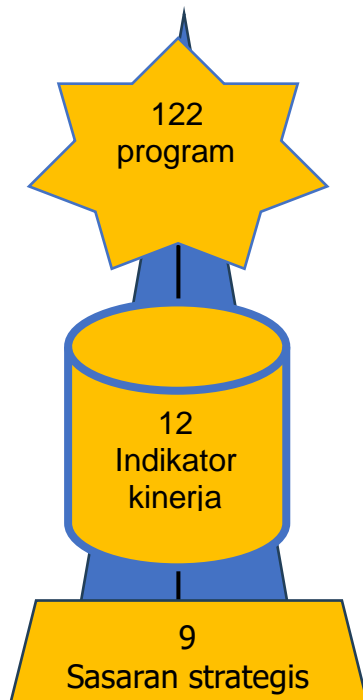


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024 menyajikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024 yang didasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sambas tahun 2021-2026. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tahun pertama Bupati dan Wakil Bupati Sambas atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk mencapai agenda pembangunan dari visi yaitu:

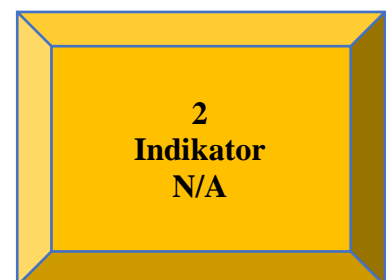
“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas terdiri atas :



Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan telah dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sambas sebagaimana SK Bupati Sambas Nomor 818/SETDA-OR/2024, Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja yang menjadi *core business* untuk mengukur pencapaian kinerja tersebut dan diperlukan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dengan jumlah sebesar Rp. 1.346.806.562.394 dengan realisasi sebesar RP. 1.141.997.280.016 dengan capaian sebesar 87,49 persen.

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas:





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja, maka sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja mencapai target di atas 100% sedangkan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai target di bawah 100%, serta sebanyak 2 (dua) indikator kinerja belum dapat diukur capaian kinerjanya sehingga jika dilihat rata-rata capaian kinerja secara umum dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2024 telah berhasil mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Sambas.

Beberapa hal yang mempengaruhi hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024 antara lain :

1. Ketidaktentuan kondisi perekonomian global (perang ukraina-rusia, ancaman resesi, dll), nasional dan lokal yang masih cukup mempengaruhi sektor perekonomian.
2. Kondisi infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung perekonomian dan peningkatan daya saing daerah, guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas.
3. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPM sehingga berakibat belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terhadap sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
4. Rendahnya produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan akibat rendahnya penggunaan bibit unggul bersertifikat.
5. Belum optimalnya sarana prasarana dan teknologi pertanian.
6. Kerusakan/pencemaran lingkungan, bencana alam dan dampak perubahan iklim.
7. Masih minimnya diversifikasi pangan Masyarakat.
8. Belum optimalnya hilirisasi industri/industrialisasi terhadap komoditi primer (sektor ekonomi basis) dengan memanfaatkan bonus demografi.
9. Belum optimalnya pembangunan ekonomi kawasan (keunggulan kompetitif /daya saing serta keunggulan komparatif Kawasan.





IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Sambas terus berupaya dalam perbaikan kinerja kedepan dengan melakukan beberapa perbaikan antara lain :

1. Pada komponen perencanaan kinerja, melakukan identifikasi indikator-indikator pada level indikator sasaran maupun program yang tidak memenuhi kriteria Spesifik, Measurable, Achievable, Relevance, Tomebound (SMART) dan cukup, namun perbaikan hanya dapat dilakukan penyempurnaan pada dokumen RKPD atau Renja tahunan dan pada tahun 2025 akan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan pohon kinerja Tingkat Kabupaten dan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021.
2. Pada komponen pengukuran kinerja, melakukan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemanfaatan Aplikasi e-SAKIP sebagaimana PKS Nomor : 02/TKKSD-TAPEM/PKS/2025 dan Nomor 100.2.2.3/02/SKU/RO-PEM dan melakukan Asistensi Penyusunan Indikator Kinerja Kabupaten dan PD dan memastikan bahwa seluruh IKU harus memuat definisi operasional dan formalisasi perhitungan.
3. Pada komponen pelaporan kinerja, pelaporan Kinerja telah dijadikan dasar dalam menetapkan strategi perencanaan kinerja pada tahun berikutnya sehingga target kinerja lebih realistis dan SMART dan melakukan asistensi penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan seluruh Laporan Kinerja Perangkat Daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.
4. Pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, memberikan dan mempertajam temuan serta rekomendasi yang lebih mendetil berdasarkan checklist kelengkapan dokumen pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE), melakukan ekspose dengan memanggil PD terkait hasil dari evaluasi AKIP PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Sambas dan mendorong agar PD menindaklanjuti rekomendasi serta saran perbaikan atas hasil evaluasi AKIP.





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Telah Direviu	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Grafik	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Sambas	2
1.2.1. Kondisi Geografis	2
1.2.2. Kondisi Topografi	4
1.2.3. Kondisi Demografis	4
1.2.4. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
1.2.5. Sumber Daya Aparatur	8
1.2.6. Sumber Daya Keuangan	10
1.3. Permasalahan Utama (<i>Issue Strategic</i>)	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sambas.....	14
2.1.1. Visi	14
2.1.2. Misi	15
2.1.3. Tujuan	16
2.1.4. Sasaran	17
2.1.5. Strategi	18
2.1.6. Arah Kebijakan	20
2.1.7. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi..	24
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas.....	29
3.2. Analisis Capaian Kinerja	30





DAFTAR ISI

	3.3. Realisasi Anggaran	92
	3.3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024	92
	3.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024	94
BAB IV	PENUTUP	102
	4.1. Kesimpulan	102
	4.2. Rekomendasi Perbaikan Kinerja Kedepan	104
Lampiran :	Pengukuran Kinerja Tahun 2024	
	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	





DAFTAR TABEL

Tabel	1	Jumlah Penduduk Kabupaten sambas Tahun 2024.....	5
Tabel	2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sambas berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan (orang) Tahun 2022-2024 (Keadaan Bulan Desember 2024)	9
Tabel	3	Jumlah PPPK di Kabupaten Sambas berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan (orang) Tahun 2022-2024 (Keadaan Bulan Desember 2024)	9
Tabel	4	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sambas berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan (orang) Tahun 2022-2024	9
Tabel	5	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	10
Tabel	6	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	25
Tabel	7	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024	28
Tabel	8	Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024	29
Tabel	9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.....	31
Tabel	10	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023-2024	31
Tabel	11	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021-2024	32
Tabel	12	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 1 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	32
Tabel	13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 1	38
Tabel	14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.....	41
Tabel	15	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023-2024	41
Tabel	16	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021-2024	41
Tabel	17	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 2 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	42
Tabel	18	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2	47





DAFTAR TABEL

Tabel	19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.....	49
Tabel	20	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023-2024	49
Tabel	21	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021-2024	50
Tabel	22	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 3 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	50
Tabel	23	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 3	53
Tabel	24	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.....	54
Tabel	25	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2023-2024	55
Tabel	26	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2021-2024	55
Tabel	27	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 4 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	55
Tabel	28	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4	58
Tabel	29	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5.....	59
Tabel	30	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2023-2024	59
Tabel	31	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2021-2024	60
Tabel	32	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 5 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	60
Tabel	33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 5	62
Tabel	34	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6.....	63
Tabel	35	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2023-2024	61
Tabel	36	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2021-2024	61
Tabel	37	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 6 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	61





DAFTAR TABEL

Tabel	38	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 6	62
Tabel	39	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7.....	70
Tabel	40	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 Tahun 2023-2024	71
Tabel	41	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 7 Tahun 2021-2024	71
Tabel	42	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 7 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	72
Tabel	43	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 7	80
Tabel	44	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8.....	82
Tabel	45	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8 Tahun 2023-2024	83
Tabel	46	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 8 Tahun 2021-2024	83
Tabel	47	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 8 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	83
Tabel	48	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 8	86
Tabel	49	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9.....	87
Tabel	50	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 Tahun 2023-2024	87
Tabel	51	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 9 Tahun 2021-2024	88
Tabel	52	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 9 dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional	88
Tabel	53	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 9	91
Tabel	54	Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024	92
Tabel	55	Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2024	93
Tabel	56	Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024	93
Tabel	57	Rincian Belanja Daerah pada Tahun 2024	94
Tabel	58	Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis Tahun 2024	95





DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sambas	2
--------	---	---	---





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pembangunan Sambas No. 80 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392544 Fax. (0562) 392544 Pos-el. Inspektoratkab.sambas@gmail.com
Laman : <https://inspektorat.sambas.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sambas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sambas, Maret 2025

INSPEKTUR KABUPATEN SAMBAS,



H. BUDIMAN, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660815 199303 1 006





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah melalui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good local governance*). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahunnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah disampaikan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi





BAB 1

PENDAHULUAN

Pemerintah dan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas 2021-2026, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sambas dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Sambas Tahun 2024.

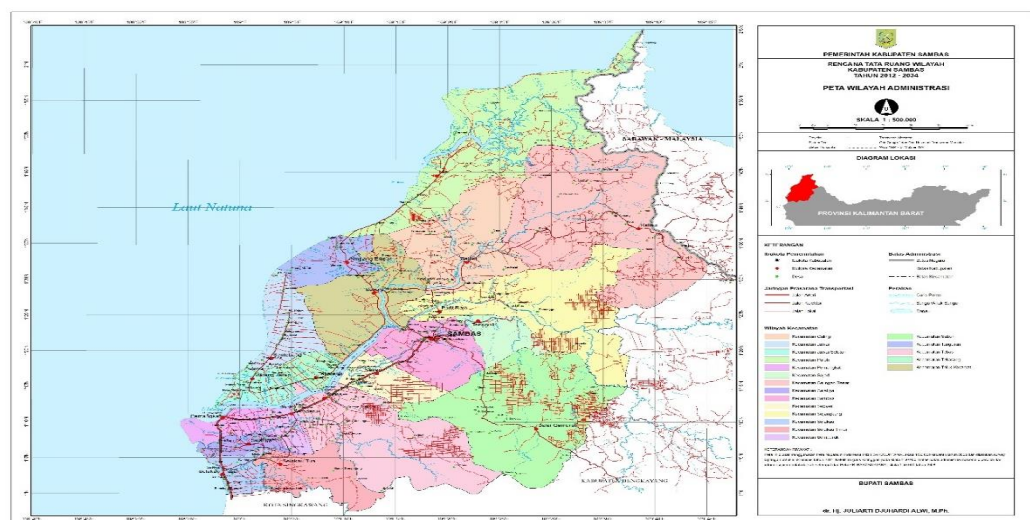
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Sambas

1.2.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sambas terletak di bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat atau diantara $0^{\circ}57'29,8^{\circ}$ dan $2^{\circ}04'53,1^{\circ}$ Lintang Utara serta $108^{\circ}51'17,0^{\circ}$ dan $109^{\circ}45'7,56^{\circ}$ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, maka daerah Kabupaten Sambas termasuk salah satu kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara asing yaitu Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Secara administratif, letak geografis Kabupaten Sambas berbatasan dengan :

Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna
Selatan : Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang
Timur : Kabupaten Bengkayang dan Serawak (Malaysia Timur)
Barat : Laut Natuna

Gambar 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Sambas



Sumber : Buku Profil Kabupaten Sambas Tahun 2024.



BAB 1 PENDAHULUAN

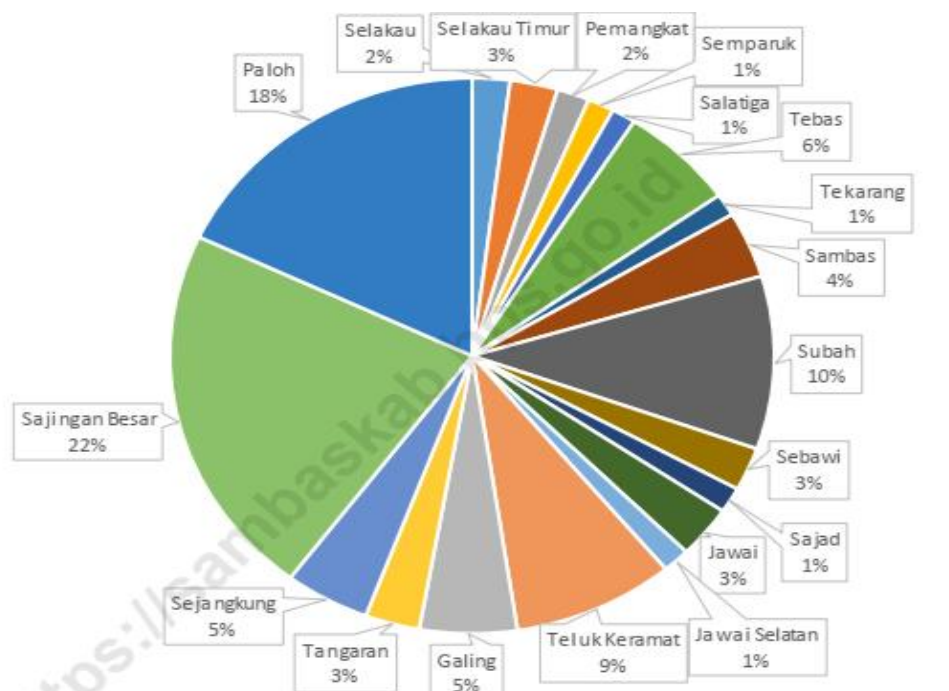
Luas Wilayah Kabupaten Sambas adalah 6.394,70 km² atau sekitar 4,36% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai Kabupaten Sambas 198,76 km, perbatasan negara \pm 97 km; dan perairan laut seluas 1.467,84 Km² dengan karakteristik sebagian besar adalah pantai berpasir membentang dari Semelagi Besar (Kec. Selakau) hingga Tanjung Datok (Kec. Paloh). Panjang pantai tiap kecamatan menurut Lapan (2003) yaitu: Kecamatan Selakau (13,51 km), Kecamatan Pemangkat (20,49 km), Kecamatan Jawai (42,53 km), Kecamatan Teluk Keramat (19,67 km), Kecamatan Paloh (102,56 km). Luas wilayah laut 12 mil dari darat: 1.467,84 km²

Kabupaten Sambas memiliki 19 kecamatan dan 193 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 Km² atau 21,75% dari luas Kabupaten Sambas sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Salatiga dengan luas 82,75 Km² atau 1,29% dari luas Kabupaten Sambas.

Luas wilayah Kabupaten Sambas menurut kecamatan (Km²) Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik 1

Luas Kecamatan (Km²) Kabupaten Sambas Tahun 2024



Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2024





BAB 1

PENDAHULUAN

1.2.2. Kondisi Topografi

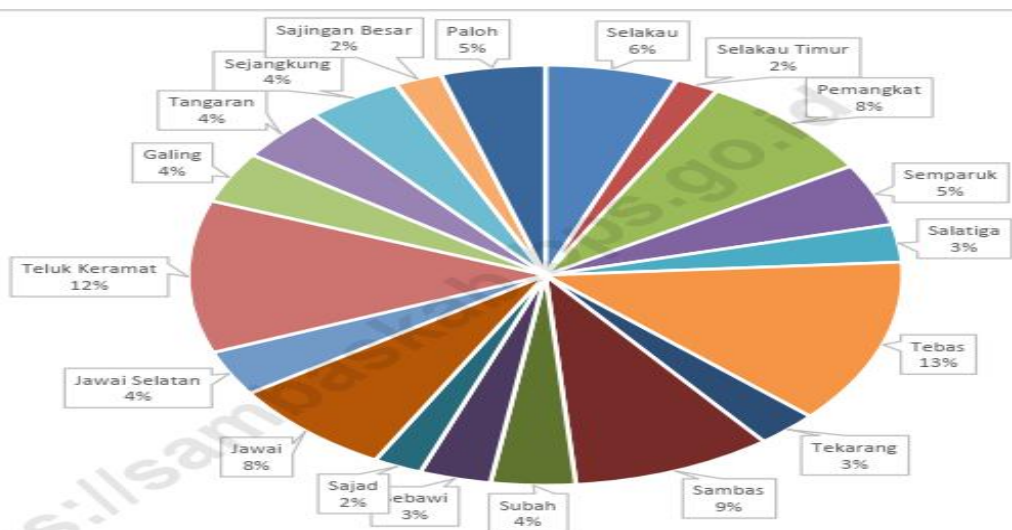
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas merupakan wilayah relatif datar (kelerengan 0 % - 15 %) dengan luas 468.196 hektar atau 67,59%, dan luas wilayah dengan kelerengan 15% - 40% adalah 160.396 hektar atau 25,08%, sedangkan kelas lereng > 40% seluas 46.832 hektar atau 7,3%. Ketinggian wilayah berbeda berdasarkan kecamatan. Ketinggian 0-7 m dpl terdapat di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Jawai, Paloh dan Teluk Keramat. Ketinggian 8-25 mdpl terdapat di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat dan Teluk Keramat. Ketinggian 26-100 mdpl terdapat di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat, Teluk Keramat dan Paloh.

1.2.3. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, seperti yang tercantum dalam Program Pembangunan Nasional bahwa manusia Indonesia atau penduduk disebut sebagai modal dasar di samping modal dasar lainnya, apabila mereka dapat dibina dan dikerahkan secara efektif. Namun penduduk juga dapat menjadi beban pembangunan apabila tidak berkualitas, baik kualitas Pendidikan, Kesehatan, mental dan fisik.

Grafik 2

Persentase Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2024



Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2023





BAB 1 PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, jumlah penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2024 berjumlah sekitar 651,246 ribu jiwa.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sambas	30,840	30,040	60,880
2	Teluk Keramat	39,491	37,520	77,011
3	Jawai	24,860	23,852	48,712
4	Tebas	42,335	40,170	82,505
5	Pemangkat	26,994	25,732	52,726
6	Sejangkung	14,594	13,553	28,147
7	Selakau	19,923	18,906	38,829
8	Paloh	16,363	15,351	31,714
9	Sajingan Besar	6,710	6,199	12,909
10	Subah	12,852	12,097	24,949
11	Galing	13,400	12,823	26,223
12	Tekarang	9,444	9,008	18,452
13	Semparuk	15,642	14,941	30,583
14	Sajad	7,219	7,131	14,350
15	Sebawi	10,922	10,487	21,409
16	Jawai Selatan	11,391	10,558	21,949
17	Tangaran	13,731	12,948	26,679
18	Salatiga	10,040	9,542	19,582
19	Selakau Timur	7,054	6,583	13,637
Kabupaten Sambas		333,805	317,441	651,246

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024



BAB 1

PENDAHULUAN

1.2.4. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Sambas telah membentuk perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang membawahi 3 (tiga) orang Asisten yaitu:

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), membawahi dan mengoordinasikan 3 (tiga) bagian yaitu:
 - a) Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c) Bagian Hukum.
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), membawahi dan mengoordinasikan 3 (tiga) bagian yaitu:
 - a) Bagian Perekonomian;
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- 3) Asisten Administrasi Umum (Asisten III), membawahi dan mengoordinasikan 4 (empat) bagian yaitu:
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Organisasi;
 - c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - d) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sambas

- c. Inspektorat Kabupaten
- d. Dinas-Dinas Daerah.





BAB 1

PENDAHULUAN

Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sambas sebanyak 17 (tujuh belas) dinas yang terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH;
- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 9) Dinas Perhubungan;
- 10) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- 13) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- 15) Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 16) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- 17) Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Badan Daerah

Badan – badan Daerah Kabupaten Sambas sebanyak 4 (empat) badan yang terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah;
- 3) Badan Keuangan Daerah;
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Kecamatan-Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Sambas mempunyai 19 (sembilan belas) Kecamatan yang terdiri dari:

- 1) Kecamatan Selakau;





BAB 1

PENDAHULUAN

- 2) Kecamatan Pemangkat;
 - 3) Kecamatan Jawai;
 - 4) Kecamatan Tebas;
 - 5) Kecamatan Sambas;
 - 6) Kecamatan Sejangkung;
 - 7) Kecamatan Teluk Keramat;
 - 8) Kecamatan Paloh;
 - 9) Kecamatan Sajingan Besar;
 - 10) Kecamatan Galing;
 - 11) Kecamatan Subah;
 - 12) Kecamatan Tekarang;
 - 13) Kecamatan Semparuk;
 - 14) Kecamatan Sebawi;
 - 15) Kecamatan Sajad;
 - 16) Kecamatan Jawai Selatan;
 - 17) Kecamatan Tangaran;
 - 18) Kecamatan Selakau Timur; dan
 - 19) Kecamatan Salatiga.
- g) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

1.2.5. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas - tugas negara atau pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Keberadaan ASN sebagai modal pokok dalam suatu pemerintahan karena berhasil tidaknya suatu pemerintahan tergantung dari kinerja pegawai yang berkualitas.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sambas berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan Tahun 2024 dapat di lihat sebagaimana tabel berikut ini :





BAB 1

PENDAHULUAN

Tabel 2
Jumlah Pegawai Sipil Negara (PNS) di Kabupaten Sambas
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan (orang)
Tahun 2022-2024 (Keadaan Bulan Desember 2024)

Golongan Ruang	Tahun								
	2022			2023			2024		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Golongan I	10	4	14	8	3	11	6	0	6
Golongan II	361	288	649	282	203	485	229	171	400
Golongan III	1.573	2.040	3.613	1.541	2.051	3.592	1.468	1.995	3.463
Golongan IV	718	628	1.346	596	501	1.097	494	399	893
Jumlah	2.662	2.960	5.622	2.427	2.758	5.185	2.197	2.565	4.762

Sumber : BKPSDMAD Kabupaten Sambas Tahun 2024

Tabel 3
Jumlah PPPK di Kabupaten Sambas
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan (orang)
Tahun 2023-2024 (Keadaan Bulan Desember 2024)

Golongan Ruang	Tahun					
	2023			2024		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Golongan V	16	5	21	16	5	21
Golongan VI	0	1	1	0	1	1
Golongan VII	22	49	71	22	49	71
Golongan VIII	0	0	0	0	0	0
Golongan IX	313	589	902	312	586	898
Golongan X	6	7	13	6	7	13
Jumlah	357	651	1.008	356	648	1.004

Sumber : BKPSDMAD Kabupaten Sambas Tahun 2024

Tabel 4
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sambas
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan (orang)
Tahun 2022-2024

Tingkat Pendidikan	Tahun								
	2022			2023			2024		
	PNS	PPPK	TOTAL	PNS	PPPK	TOTAL	PNS	PPPK	TOTAL
SD	12	0	12	9	0	9	8	0	8
SLTP	37	0	37	32	0	32	25	0	25
SLTA	710	21	731	605	21	626	483	21	504
D-I	19	0	19	14	0	14	6	0	6





BAB 1

PENDAHULUAN

D-II	342	1	343	208	1	209	120	1	121
D-III	892	71	963	863	71	934	812	71	883
D-IV	165	4	169	144	4	148	163	4	167
S-1	3.183	911	4.094	3.054	911	3.965	2.890	907	3.797
S-2	255	0	255	251	0	251	249	0	249
S-3	7	0	7	5	0	5	6	0	6
Jumlah	5.622	1.008	6.630	5.185	1.008	6.193	4.762	1.004	5.766

Sumber : BKPSDMAD Kabupaten Sambas Tahun 2024

1.2.6. Sumber Daya Keuangan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sambas dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut :

Tabel 5

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	312.334.477.478,00	229.120.841.939,69	83.213.635.538,31	73,36
4.1.01	PAJAK DAERAH	51.964.431.990,00	49.427.529.725,56	2.536.902.264,44	95,12
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	4.124.800.000,00	4.899.915.339,00	-755.115.339,00	118,79
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.707.885.391,00	3.707.885.391,00	0,00	100,00
4.1.04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	252.537.360.097,00	171.085.511.484,13	81.451.848.612,87	67,75
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.913.811.296.151,00	1.872.025.231.888,00	41.786.064.263,00	97,82
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.786.621.140.443,00	1.772.304.383.948,00	14.316.756.495,00	99,20
4.2.01.01	DANA PERIMBANGAN	1.582.960.731.443,00	1.568.644.074.948,00	14.316.656.495,00	99,10
4.2.01.05	DANA DESA	189.754.697.000,00	189.754.697.000,00	0,00	100,00
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	127.190.155.708,00	99.720.847.940,00	27.469.307.768,00	78,40
4.2.02.01	PENDAPATAN BAGI HASIL	119.440.155.708,00	92.147.501.590,00	27.292.654.118,00	77,15
4.2.02.02	BANTUAN KEUANGAN	7.750.000.000,00	7.573.346.350,00	176.653.650,00	97,72





BAB 1

PENDAHULUAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.128.000.000,00	1.126.118.000,00	1.882.000,00	99,83
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	1.128.000.000,00	1.126.118.000,00	1.882.000,00	99,83
	JUMLAH PENDAPATAN	2.227.273.773.629,00	2.102.272.191.827,00	125.001.581.801,31	94,39
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.533.342.829.012,00	1.390.981.011.773,28	142.361.817.238,72	90,72
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	669.134.194.007,00	642.865.726.454,12	26.268.467.522,88	96,07
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	672.895.206.250,00	583.619.065.645,48	89.276.140.604,52	86,73
5.1.03	BELANJA BUNGA	10.600.000.000,00	10.573.881.395,68	26.118.604,32	99,75
5.1.05	BELANJA HIBAH	179.481.257.940,00	152.778.335.378,00	26.702.922.562,00	85,12
5.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.232.170.815,00	1.144.002.900,00	88.167.915,00	92,84
5.2	BELANJA MODAL	400.274.868.196,00	286.839.372.979,25	113.435.495.216,75	71,66
5.2.01	BELANJA MODAL TANAH	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	54.674.344.560,00	49.279.078.359,26	5.395.266.200,74	90,13
5.2.03	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	107.951.637.200,00	92.414.418.543,00	15.537.218.657,00	85,61
5.2.04	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	229.077.052.336,00	137.545.363.276,99	91.531.689.059,01	60,04
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	8.221.834.100,00	7.600.512.800,00	621.321.300,00	92,44
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.068.832.516,00	150.475.000,00	918.357.516,00	14,08
5.4	BELANJA TRANSFER	300.902.458.193,00	300.100.947.354,00	801.510.839,00	99,73
5.4.01	BELANJA BAGI HASIL	5.471.968.454,00	5.471.968.454,00	0,00	100,00
5.4.02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	295.430.489.739,00	294.628.978.900,00	801.510.839,00	88,48
	JUMLAH BELANJA	2.235.588.987.917,00	1.978.071.807.106,53	257.517.180.810,47	88,48
	SURPLUS (DEFISIT)	-8.315.214.288,00	124.200.384.721,16	-132.515.599.099,16	-1.493,65
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	240.315.214.288,00	114.914.953.488,17	125.400.260.799,83	47,82
6.1.01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	18.315.214.288,00	18.314.953.488,17	260.799,83	100,00
6.1.04	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	220.000.000.000,00	96.600.000.000,00	125.400.000.000,00	43,51
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	240.315.214.288,00	114.914.953.488,17	125.400.260.799,83	47,82
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	232.000.000.000,00	232.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.03	PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG YANG JATUH TEMPO	232.000.000.000,00	232.000.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	232.000.000.000,00	232.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	8.315.214.288,00	-117.085.046.511,83	125.400.260.799,83	-1.408,08
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	7.155.338.209,00	-7.155.338.209,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024





BAB 1

PENDAHULUAN

1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2021-2026, adapun permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Kabupaten Sambas ke depan masih dihadapkan pada kondisi sebagai berikut :

1. Ketidaktentuan kondisi perekonomian global (perang ukraina-rusia, ancaman resesi, dll), nasional dan lokal yang masih cukup mempengaruhi sektor perekonomian.
2. Kondisi infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung perekonomian dan peningkatan daya saing daerah, guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas.
3. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPM sehingga berakibat belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terhadap sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
4. Rendahnya produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan akibat rendahnya penggunaan bibit unggul bersertifikat.
5. Belum optimalnya sarana prasarana dan teknologi pertanian.
6. Kerusakan/pencemaran lingkungan, bencana alam dan dampak perubahan iklim.
7. Masih minimnya diversifikasi pangan Masyarakat.
8. Belum optimalnya hilirisasi industri/industrialisasi terhadap komoditi primer (sektor ekonomi basis) dengan memanfaatkan bonus demografi.
9. Belum optimalnya pembangunan ekonomi kawasan (keunggulan kompetitif /daya saing serta keunggulan komparatif Kawasan.





BAB 1

PENDAHULUAN

Seiring dengan hal tersebut, serta mengacu pada tema dan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 yakni “Peningkatan Ekonomi Inklusif, Daya Saing Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan Kabupaten Sambas yang berkemajuan”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekonomi daerah melalui peningkatan produktifitas pertanian dan sinergi pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja sebagai upaya pengurangan kemiskinan serta meningkatkan daya saing daerah.
2. Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas, dan berdaya saing yang didukung dengan peningkatan digitalisasi administrasi pemerintahan.

Adapun Program Prioritas tahun 2024 yang diselaraskan dengan 9 program unggulan daerah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi , antara lain ;

1. Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang didukung dengan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan (selaras dengan Program Unggulan Daerah OVOP, Tema Sipindu, Rusimah dan Green Growth).
2. Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 0% (selaras dengan Program Unggulan Daerah OVOP dan Pemuda Siap Kerja).
3. Program Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (selaras dengan Program Unggulan Daerah Pemuda Siap Kerja).
4. Program Pembangunan Perbatasan (selaras dengan Program Unggulan Daerah OVOP).





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Pemerintah Kab. Sambas

2.1.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun ke depan, jargon yang digunakan adalah **“Sambas Baru, Berkemajuan”**, yang dapat dimaknai dengan pemimpin baru dan semangat baru bersama dan bekerjasama bergerak ke depan untuk lebih unggul. Kata **Berkemajuan** merupakan singkatan dari :

- **Ber** = Beriman kepada Allah SWT
- **Ke** = Kemandirian
- **Maju** = Maju
- **An** = Berkelanjutan

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 di bawah kepemimpinan Bupati Sambas H. Satono, S.Sos., I.M.H. dan Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, S.I.P., M.H.Sc. adalah :

“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- a. **Beriman** adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman dan bertakwa kepada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (*good and clean government*).
- b. **Kemandirian** adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, peningkatan kontribusi sector industry dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

- c. **Maju** adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2016-2021). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.
- d. **Berkelanjutan** adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjadi fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi.

2.1.2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan masyarakat yang taqwa serta taat dan tertib hukum dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah (*good and clean government*) dan berorientasi pada pelayanan public yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi, yaitu mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan desa mandiri,





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil menengah, koperasi dan industri;

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing;
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, yaitu dengan meningkatkan investasi, maka akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja sehingga berdampak terhadap berkurangnya angka pengangguran, angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan; dan
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya alam dan lingkungan.

2.1.3. Tujuan:

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, Bersatu dan berwawasan kebangsaan;
2. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya;
3. Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
4. Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah;
5. Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk mendorong perekonomian daerah;





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

6. Meningkatnya status kemajuan desa;
7. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;
8. Meningkatnya kesempatan kerja;
9. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
10. Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana.

2.1.4. Sasaran

Adapun sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, Bersatu dan berwawasan kebangsaan;
2. Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah;
3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan;
6. Meningkatnya laju PDRB di setiap sektor;
7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
8. Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah;
9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
10. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, inovatif dan berdaya saing;
11. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS;
12. Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan;
13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
14. Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana.





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1.5. Strategi

Untuk mencapai visi dan misi yang telah disampaikan di atas, maka strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum dan ketentraman serta ketertiban masyarakat;
 - b. Peningkatan kerukunan hidup dan rasa wawasan kebangsaan; dan
 - c. Peningkatan pembinaan keagamaan di segala sector kehidupan bermasyarakat;
 - d. Peningkatan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya lokal;
 - e. Peningkatan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - f. Peningkatan implementasi rencana kelitbangan dan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah;
 - g. Peningkatan komunikasi, informasi dan transparansi pemerintahan;
 - h. Peningkatan tata kelola kearsipan;
 - i. Peningkatan kualitas statistik daerah;
 - j. Peningkatan penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
 - k. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - l. Peningkatan dukungan terhadap peningkatan kinerja DPRD;
 - m. Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan;
 - n. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk;
 - o. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - p. Peningkatan persandian;
 - q. Peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap ASN;





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

- r. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- s. Peningkatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi.
 - a. Peningkatan rasio kewirausahaan;
 - b. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah;
 - c. Peningkatan persentase koperasi yang berkualitas;
 - d. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor jasa administrasi perusahaan dalam perekonomian daerah;
 - e. Peningkatan kunjungan wisata;
 - f. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perikanan dalam perekonomian daerah;
 - g. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam perekonomian daerah;
 - h. Peningkatan ketersediaan pangan;
 - i. Peningkatan ketersediaan dan kelayakan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar dan peningkatan jalan poros desa dalam kondisi mantap;
 - j. Peningkatan ketersediaan dermaga/stegher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang;
 - k. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni;
 - l. Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik;
 - m. Peningkatan rumah tangga pengguna air minum;
 - n. Peningkatan rumah tangga bersanitasi layak;
 - o. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - p. Peningkatan status perkembangan satuan pemukiman transmigrasi.
3. Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

- a. Peningkatan perlindungan terhadap anak;
 - b. Peningkatan akses Pendidikan masyarakat dan peningkatan derajat dan mutu Pendidikan masyarakat;
 - c. Peningkatan pemberdayan dan perlindungan terhadap perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
 - d. Peningkatan pembinaan pemuda;
 - e. Peningkatan pembangunan literasi masyarakat;
 - f. Peningkatan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - g. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat;
 - h. Peningkatan pembinaan olah raga; dan
 - i. Peningkatan perlindungan dan rehabilitasi sosial.
4. Strategi untuk mewujudkan Misi Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
 - a. Peningkatan kesempatan kerja.
 5. Strategi untuk mewujudkan Misi Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 - a. Peningkatan kualitas lahan;
 - b. Peningkatan kualitas air;
 - c. Peningkatan kualitas udara;
 - d. Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan tata ruang;
 - e. Peningkatan kewaspadaan dini terhadap bencana dan perlindungan terhadap resiko bencana.

2.1.6. Arah Kebijakan

1. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan:
 - a. Meningkatkan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai budaya di masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

- b. Meningkatkan pembinaan penyuluh agama, tokoh agama, guru ngaji, amil dan lebai, kegiatan keagamaan dan tempat-tempat ibadah serta meningkatkan kerukunan antar umat beragama;
- c. Meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum terpadu serta pembinaan kepada masyarakat dan kelompok keluarga sadar hukum;
- d. Meningkatkan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan perda dan perkara;
- e. Meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat;
- f. Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan kehidupan politik di masyarakat;
- g. Meningkatkan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- h. Meningkatkan dukungan dan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRD;
- i. Meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap ASN;
- j. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan;
- k. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- l. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk;
- n. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah;
- o. Meningkatkan penerapan Aplikasi Informatika pada Pemerintah Daerah / e-government;
- p. Meningkatkan komunikasi, informasi dan transparansi pemerintahan;
- q. Meningkatkan kualitas statistic daerah;
- r. Meningkatkan persandian;
- s. Meningkatkan tata kelola kearsipan dan pengelola arsip;





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

- t. Meningkatkan kemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi penerapan inovasi bagi pembangunan daerah;
 - u. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban dan pelayanan public;
 - v. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - w. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - x. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi:
- a. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri;
 - b. Meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor;
 - c. Peningkatan pertumbuhan omset pedagang pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
 - d. Terjaganya stabilitas harga bahan kebutuhan pokok;
 - e. Meningkatkan produktivitas mekanisasi pertanian dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - f. Meningkatkan produksi di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. Meningkatkan produksi di sektor peternakan;
 - h. Meningkatkan daya Tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - i. Meningkatkan kemudahan perizinan dan layanan investasi;
 - j. Meningkatkan investasi, penanaman modal dan kelancaran izin usaha;
 - k. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi;
 - l. Meningkatkan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha;
 - m. Meningkatkan rasio eirausaha berskala mikro naik kelas;
 - n. Meningkatkan ketersediaan pangan;
 - o. Meningkatkan jalan poros kabupaten dan jalan poros desa dalam kondisi mantap;





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

- p. Meningkatkan penataan bangunan Gedung dan lingkungannya;
 - q. Meningkatkan jaringan irigasi dalam kondisi baik;
 - r. Meningkatkan konektivitas, ketertiban dan keamanan di sektor perhubungan;
 - s. Meningkatkan rumah tangga pengguna air minum yang layak;
 - t. Meningkatkan rumah tangga bersanitasi yang layak;
 - u. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni;
 - v. Meningkatkan komponen dimensi dan peubah satuan pemukiman; dan
 - w. Meningkatkan penataan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia:
- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses Pendidikan;
 - c. Meningkatkan Kesehatan perorangan dan masyarakat;
 - d. Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan dan sarpras Kesehatan;
 - e. Meningkatkan budaya literasi masyarakat;
 - f. Meningkatkan prestasi dan daya saing pemuda;
 - g. Meningkatkan pembinaan olahraga;
 - h. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan;
 - i. Meningkatkan kualitas keluarga;
 - j. Meningkatkan perlindungan terhadap anak;
 - k. Meningkatkan pengendalian penduduk;
 - l. Meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial; dan
 - m. Meningkatkan pemberdayaan sosial.
4. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja:
- a. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja; dan
 - b. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja.





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

5. Kebijakan untuk mewujudkan Misi Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 - a. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penanganan pengaduan kualitas air;
 - b. Meningkatkan penanganan sampah perkotaan;
 - c. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penanganan pengaduan kualitas udara;
 - d. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas;
 - e. Meningkatkan sosialisasi kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap kebakaran; dan
 - f. Meningkatkan penataan ruang dalam pembangunan daerah.

2.1.7. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Keterkaitan antara visi dan misi, yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :





BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Tabel 6

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “*Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan*”.

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 1 :		Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama,budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan			
1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya	1.	Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah	1.	Peningkatan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya lokal.
2.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, Bersatu dan berwawasan kebangsaan	2.	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, Bersatu dan berwawasan kebangsaan	2.	Peningkatan pembinaan keagamaan di segala sektor kehidupan bermasyarakat;
				3.	Peningkatan kesadaran hukum dan ketentraman serta ketertiban masyarakat;
				4.	Peningkatan kerukunan hidup dan rasa wawasan kebangsaan;
3.	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	5.	Peningkatan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
				6.	Peningkatan dukungan terhadap peningkaan kinerja DPRD;
				7.	Peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap ASN;
				8.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
				9.	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
				10.	Peningkatan kualitas pelayanan public di bidang adminduk;
				11.	Peningkatan penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
				12.	Peningkatan komunikasi, informasi dan transparansi pemerintahan;
				13.	Peningkatan kualitas statistic daerah;
				14.	Peningkatan persandian;
				15.	Peningkatan tata kelola kearsipan;





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

				16.	Peningkatan implementasi rencana kelitbangan dan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah;
				17.	Peningkatan kualitas pelayanan public di kecamatan;
		4.	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.	18.	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan; dan
				19.	Peningkatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Misi 2 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi.					
4.	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	1.	Meningkatnya laju PDRB di setiap sektor	1.	Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah;
				2.	Peningkatan laju pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam perekonomian daerah;
				3.	Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perikanan dalam perekonomian daerah;
				4.	Peningkatan kunjungan wisata;
				5.	Peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor jasa administrasi perusahaan dalam perekonomian daerah;
				6.	Peningkatan persentase koperasi yang berkualitas;
				7.	Peningkatan rasio kewirausahaan;
		2.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	8.	Peningkatan ketersediaan pangan;
5.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk mendorong perekonomian daerah	3.	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah	9.	Peningkatan ketersediaan dan kelayakan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar dan peningkatan jalan poros desa dalam kondisi mantap;
				10.	Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik;
				11.	Peningkatan ketersediaan dermaga/stegher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang;
				12.	Peningkatan rumah tangga pengguna air minum;
				13.	Peningkatan rumah tangga bersanitasi layak;
				14.	Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni;





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

6.	Meningkatnya status kemajuan desa	4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa	15.	Peningkatan status perkembangan satuan pemukiman transmigrasi;
				16.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
Misi 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia					
7.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1.	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, inovatif	1.	Peningkatan akses Pendidikan masyarakat dan peningkatan derajat dan mutu Pendidikan masyarakat;
				2.	Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat;
				3.	Peningkatan pembangunan literasi masyarakat;
				4.	Peningkatan pembinaan pemuda;
				5.	Peningkatan pembinaan olah raga;
				6.	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
				7.	Peningkatan perlindungan terhadap anak;
				8.	Peningkatan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
		2.	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap PMKS	9.	Peningkatan perlindungan dan rehabilitasi sosial.
Misi 4 : Meningkatkan pempadatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.					
8.	Meningkatnya kesempatan kerja	1.	Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan	1.	Peningkatan kesempatan kerja
Misi 5 : Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.					
9.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.	Peningkatan kualitas air;
				2.	Peningkatan kualitas udara;
				3.	Peningkatan kualitas lahan;
10.	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	2.	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	4.	Peningkatan kewaspadaan dini terhadap bencana dan perlindungan terhadap resiko bencana;
				5.	Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan tata ruang.





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas
Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4,8
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71
3.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	6.94
		Indeks Gini	0.268
4.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0
5.	Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	150,72
6.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Mantap	73,10
7.	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		Nilai SAKIP	BB
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP
8.	Meningkatnya Status Kemajuan Desa	Jumlah Desa Mandiri	189
9.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,98

Jumlah total Anggaran Belanja untuk mencapai keberhasilan Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.240.502.546.380,00.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah kab. Sambas

Dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022-2026 yang telah dilakukan beberapa kali perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sambas Nomor 818/SETDA-OR/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 1026/SETDA-OR/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sambas Tahun 2022-2206.

Untuk menentukan Capaian kinerja setiap indikator dapat dilihat dengan melakukan pengukuran kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

Tingkat pencapaian indikator kinerja Tahun 2024, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Indikator	Kategori Capaian
1	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	1	Pertumbuhan ekonomi	98,75	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	2	Indek Pembangunan Manusia	100,28	Tercapai
3	Menurunnya angka kemiskinan	3	Angka Kemiskinan	106,28	Tercapai
		4	Indeks Gini	N/A	N/A
4	Menurunnya tingkat pengangguran	5	Tingkat Pengangguran Terbuka	100,20	Tercapai
5	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	6	Indeks Resiko Bencana	112,02	Tercapai





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

6	Meningkatnya kualitas infrastruktur	7	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	101,85	Tercapai
7	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	8	Indeks Reformasi Birokrasi	108	Tercapai
		9	Nilai SAKIP	90,86	Tidak Tercapai
		10	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	N/A	N/A
8	Meningkatnya Status Kemajuan Desa	11	Jumlah Desa Mandiri	100	Tercapai
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	91,32	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat rata-rata tingkat capaian kinerja Sasaran Strategis Kabupaten Sambas dengan 9 (sembilan) sasaran dan 12 (dua belas) indikator, menunjukkan bahwa **7 (tujuh) indikator kinerja dengan kategori Tercapai, 3 (tiga) indikator kinerja dengan kategori Tidak Tercapai, dan 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori N/A.**

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian setiap indikator sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1: “Meningkatnya Kemandirian Perekonomian Daerah”

“Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi *“Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi”*. Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, Dinas Pertanian dan Ketahanan





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pangan Kabupaten Sambas, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2024 didukung APBD dengan 33 (tiga puluh tiga) program dengan anggaran sebesar Rp. 65.391.653.875 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 54.817.057.213 atau 83,83 persen dari yang telah dianggarkan.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran I dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi	-	4,8	4,74	98,75%

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi belum mencapai target yang telah ditentukan sebesar 4,8 dengan realisasi sebesar 4,74 dengan capaian 98,75 persen dan dikategorikan tidak tercapai.

Tabel 10
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun 2023		Capaian Kinerja 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	3,62	4,69	129,56 %	4,8	4,74	98,75%

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,05 persen dibanding Tahun 2023 namun mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 30,81 persen dikarenakan dilakukan penyesuaian target pada Tahun 2024.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2021-2024

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,37	4,64	4,69	4,74

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Sambas Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,37 persen dari Tahun 2021.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,74	5,03	5,3-5,7

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 baru mencapai 94,23 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan realisasi pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas masih lebih rendah dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,4-6,0 persen. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,03 persen

Analisis keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 1, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Sambas tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 28,561 triliun dan PDRB perkapita mencapai RP 43,610 juta. Dari sisi produksi pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Real Estate sebesar 7,57 persen. Sementara dari sisi pengeluaran





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

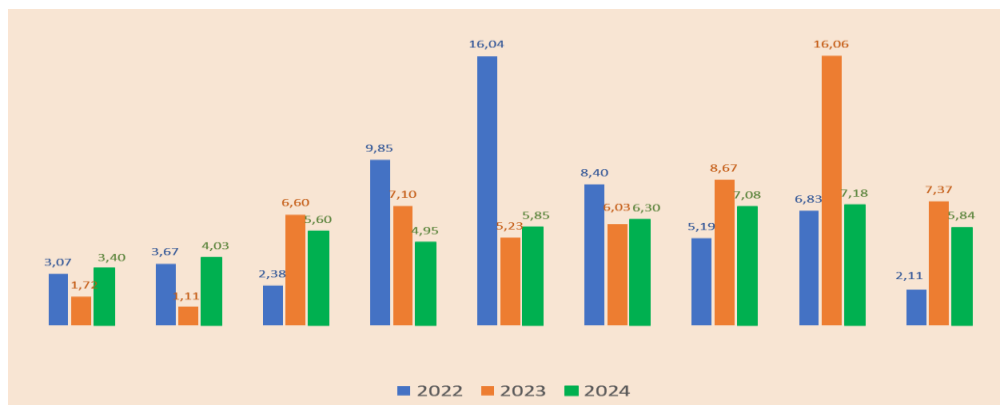
komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga. Selain itu, struktur ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2024 didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 32,56 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,88 persen, dan Industri Pengolahan 11,57 persen. Sedangkan empat belas lapangan usaha lainnya masing-masing berkontribusi di bawah 9 persen. Sementara dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 51,75 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 25,37 persen, dan Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar 12,89 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas dapat dilihat dijelaskan sebagai berikut :

a) PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Real Estate sebesar 7,57 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,18 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,08 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,30 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,29 persen; Jasa Perusahaan sebesar 6,02 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,40 persen.

Grafik 3
Pertumbuhan PDRB Beberapa lapangan usaha Tahun 2022-2024



Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Bila dicermati lebih lanjut dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada tahun 2024, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,16 persen, diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebesar 0,88 persen, Lapangan usaha lainnya sebesar 0,53 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 0,48 persen, dan lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 0,46 persen.

Grafik 4
Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa lapangan usaha
Tahun 2022-2024



Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024

Struktur PDRB Kabupaten Sambas menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 sedikit mengalami pergeseran. Seperti Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami perubahan dari 32,78 persen pada tahun 2023 menjadi 32,56 persen pada tahun 2024. Industri Pengolahan menjadi 11,41 persen pada tahun 2023 menjadi sebesar 11,57 persen pada tahun 2024. Sektor Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor menjadi 17,88 persen. Meski demikian perekonomian Kabupaten Sambas masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 32,56 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 17,88 persen; Industri Pengolahan sebesar 11,57 persen;





BAB 3

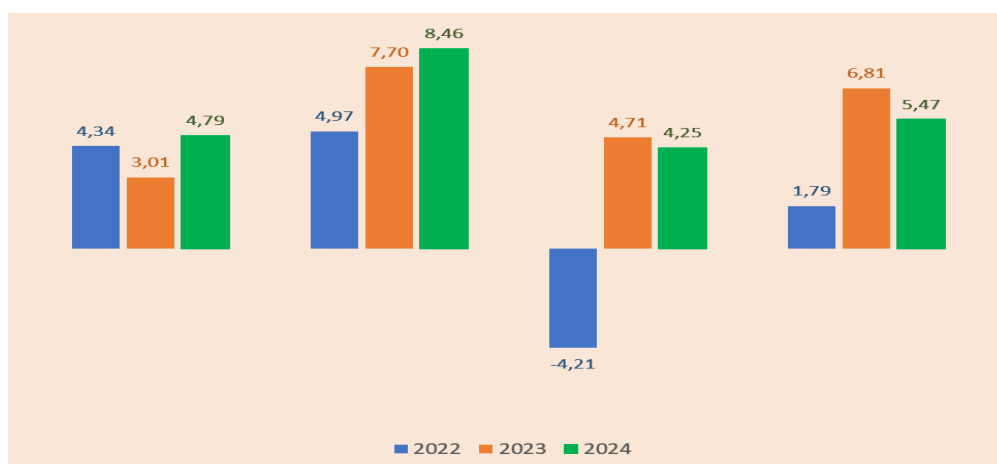
AKUNTABILITAS KINERJA

Konstruksi sebesar 8,86 persen; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,06 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Sambas mencapai 76,93 persen.

b) PDRB Menurut Pengeluaran

Ditinjau dari PDRB Pengeluaran Ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2024 tumbuh sebesar 4,74 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,79 persen, konsumsi LNPRRT tumbuh sebesar 8,46 persen, Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 4,25 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 5,47 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perekonomian Kabupaten Sambas tumbuh lebih tinggi.

Grafik 5
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran
Tahun 2022-2024



Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024

Jika dicermati berdasarkan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten Sambas 2024, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 2,42 persen. Selanjutnya diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki sumber pertumbuhan sebesar 1,36 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,37 persen. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi LNPRRT sebesar 0,10 persen.

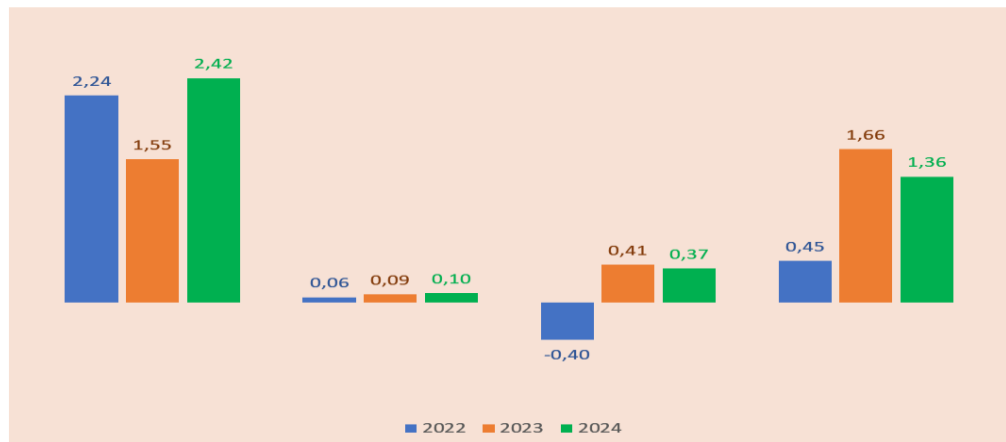




BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Grafik 6
Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran
Tahun 2022-2024



Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024

Struktur PDRB Kabupaten Sambas menurut Pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 sedikit mengalami perubahan. Perekonomian Kabupaten Sambas masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 51,75 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 25,37 persen, Net ekspor Barang dan Jasa 12,89 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 8,61 persen, Perubahan Inventori sebesar 0,25 persen, dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,13. Persen.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi antara lain :

- Pada sektor industri pengolahan, upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM melalui pelatihan manajemen usaha dan produksi, serta monitoring dan pendampingan dalam menjalankan kepatuhan komitmen perizinan seperti pembuatan dan pelaporan akun SIINAS. Selain itu, membantu masyarakat dalam upaya promosi penjualan pada industri pengolahan.
- Pada sektor pertanian upaya yang dilakukan adalah mengkampanyekan diversifikasi pangan lokal melalui festival pangan lokal beragam, bergizi seimbang dan aman, pemberian bantuan benih sayur, bibit buah dan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani. Selain itu upaya yang





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

dilakukan yaitu melalui percepatan tanam dan luas tambah tanam yang merupakan program Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan beberapa kegiatan seperti melaksanakan SL budidaya padi, SL pupuk bersubsidi dan bantuan kepada kelompok tani.

- c) Pada sektor Perkebunan, upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan pelatihan kepada kelompok tani berupa teknologi moraga serta Analisa pasar di 5 Kecamatan sentra jeruk di Kabupaten Sambas, penyediaan sarana produksi jeruk baik bubuk, pupuk dan pengendalian hama penyakit. Selain itu upaya yang dilakukan yaitu melakukan bimbingan teknis kepada para petani karet dalam peningkatan produksi karet dan memperbaiki tananan Perkebunan karet dengan melakukan peremajaan guna meningkatkan hasil produksi dengan bibit unggul.
- d) Pada sektor perikanan, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan intervensi berupa pemberian hibah barang kepada nelayan dan pelaku pengolahan di Kabupaten Sambas seperti mesin, alat tangkap, sarana dan prasarana tangkap dan sarana dan prasarana pengolahan. Pada Tahun 2024 produksi perikanan Kabupaten Sambas adalah sebesar 53.218,99 Ton dan produksi peternakan Kabupaten Sambas adalah sebesar 6.082,62 Ton. Selain itu jumlah RTP kabupaten Sambas pada Tahun 2024 adalah 1.455 RTP dengan luas lahan pembudidayaan 29.775.520 m².
- e) Pada sektor jasa Perusahaan upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam perencanaan investasi makro yang berorientasi pada potensi unggulan daerah dan meningkatkan promosi investasi untuk menarik investor baik dalam negeri maupun investor asing. Pada tahun 2024 nilai investasi Kabupaten Sambas adalah PMDN Rp. 12.634.836.733.369 dan PMA Rp. 8.558.615.771.862 dengan total investasi Rp. 21.193.452.505.231.
- f) Pada sektor pariwisata upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana daya tarik wisata, penyelenggaraan





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

event pariwisata daerah dan peningkatan promosi pariwisata melalui platform digital dan bekerjasama dengan pihak investor dalam peningkatan kualitas pariwisata di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Sambas sebesar 65.783 orang mengalami peningkatan sebesar 519 orang dibanding tahun 2023 dengan jumlah kunjungan wisata 65.264.

- g) Pada sektor kewirausahaan upaya yang dilakukan antara lain meminta kepada pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan harga melalui google form yang telah disediakan, melaksanakan beberapa kegiatan seperti operasi pasar telur yang dilaksanakan guna menyambut Hari Raya Idul Fitri yang telah dilaksanakan di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Selakau, Pemangkat, Tebas, Sambas dan Teluk Keramat serta operasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang telah dilaksanakan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Selakau, Sajingan Besar dan Subah. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan monitoring harga dan stock serta pendistribusian barang kebutuhan pokok dan barang penting di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran I dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kemandirian Perekonomian Daerah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.275.367.314	3.250.210.369	99,23
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	7.165.000	7.165.000	100
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	18.536.000	18.459.006	99,58
		Program Pengembangan Ekspor	95.063.219	94.634.419	99,55
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.3563.96.746	1.060.747.288	78,20
		Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	560.747.408	559.317.882	99,75
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1467.534.768	146.6646.510	99,94





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.702.216.363	2.845.124.076	76,85
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	37.204.493.618	30.665.161.194	82,42
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	75.680.110	58.389.280	77,15
		Program Perizinan Usaha Pertanian	603.017.765	482.095.648	79,95
		Program Penyuluhan Pertanian	2.174.228.522	1.432.596.631	65,89
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.097.678.268	4.524.119.101	88,75
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.521.530.580	2.198.200.320	87,18
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	217.790.868	187.369.095	86,03
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	80.9495.829	646.470.513	79,86
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.026.959.559	344.499.759	33,55
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	381.150.000	374.754.072	98,32
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.103.149.888	2.077.214.633	98,77
		Program Pemasaran Pariwisata	625.911.972	624.277.067	99,74
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	99.999.972	996.167	9,96
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	132.500.108	132.331.508	98,87
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	82.633.181	81.142.514	98,20
		Program Promosi Penanaman Modal	21.163.984	21.156.961	99,97
		Program Pelayanan Penanaman Modal	175.229.777	171.924.967	98,11
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	453.859.080	449.359.377	99,01
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	47.645.824	47.545.603	99,79
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	44.088.000	43.304.600	98,22





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	100.221.000	99.460.742	99,24
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	264.669.544	264.629.356	99,98
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	121.808.864	121.300.064	99,58
		Program Pengembangan UMKM	523.720.744	457.487.986	87,35
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	880.650.690	686.008.692	77,19
Realisasi Anggaran					83,83
Capaian Kinerja					98,75
Tingkat Efisiensi					14,92

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sambas, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas Tahun 2024.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 83,83 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 98,75 persen maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 14,92 persen.

SASARAN 2:

“Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”

“Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2024 didukung APBD dengan 21 (dua





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

puluh satu) program dengan anggaran sebesar Rp. 553.817.680.089 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 509.005.089.604 atau 91,91 persen dari yang telah dianggarkan.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 2 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 14
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	71	71.20	100,28%

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 71 dengan realisasi sebesar 71,20 dengan capaian 100,28 persen dan dikategorikan tercapai.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun 2023		Capaian Kinerja 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,73	70,60	102,72%	71	71.20	100,28%

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten sambas Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,60 persen dibanding Tahun 2023.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2
Tahun 2021-2024

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,03	69,88	70,60	71.20

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten sambas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2024, IPM Kabupaten Sambas naik sebesar 2,17 persen dibanding tahun 2021.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Indeks pembangunan Manusia (IPM)	71,20	70,39	73,99 – 74,02

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas pada Tahun 2024 telah mencapai target akhir RPJMD dengan realisasi sebesar 101,15 persen. Realisasi indeks pembangunan manusia kabupaten sambas lebih rendah jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 73,99 – 74,02, pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional mencapai 75,02 persen.

Analisis keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 2, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas pada tahun 2024 mencapai 71,20, meningkat 0,60 poin (0,85 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (70,60). Pembangunan manusia di Kabupaten Sambas terus mengalami kemajuan. Selama 2020-2022, status pembangunan manusia di Kabupaten Sambas berada di level “sedang” dan tahun 2023-2024 sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020-2024, IPM Kabupaten Sambas rata-rata meningkat sebesar 0,80 persen per tahun dari 68,97 pada tahun 2020 menjadi 71,20 pada tahun 2024. Perkembangan IPM selama 2020-2024 dapat dilihat pada grafik Berikut ini :

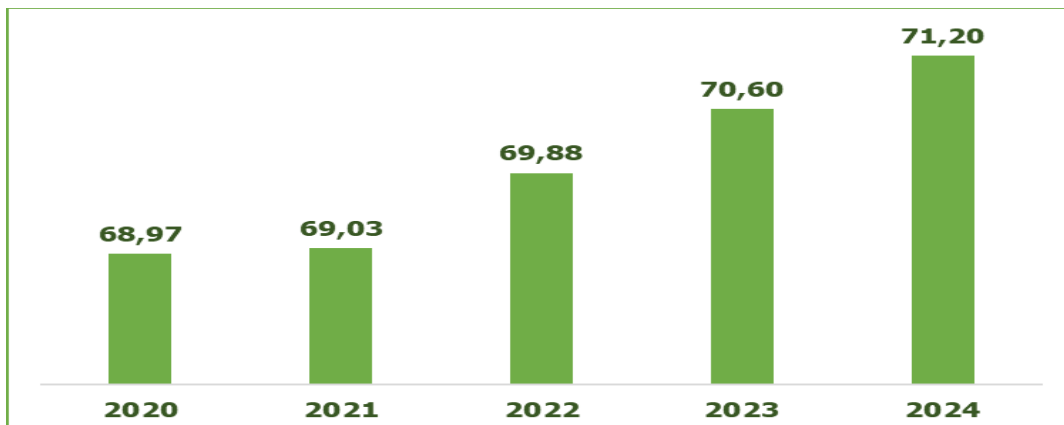




BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Grafik 7
Capaian IPM Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024



Sumber data : BPS Kabupaten Sambas

Indeks Pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2024 mendapat peringkat ke 3 (tiga) dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan mendapat peringkat 1 (satu) dari 12 (dua belas) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat hal ini tidak lepas dari kontribusi dari perangkat daerah yang mengampu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas

Capaian IPM Kabupaten Sambas tahun 2024 yang meningkat 0,60 poin dari tahun sebelumnya didukung oleh peningkatan semua dimensi IPM antara lain :

a) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,30 tahun dibandingkan tahun 2023, dari 74,02 tahun menjadi 74,32 tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 1,02 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,35 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Sambas adalah 73,30 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,32 tahun.

b) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2024 harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas meningkat 0,04 tahun (0,31 persen) dibandingkan tahun 2023, dari 12,72 menjadi 12,76 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,01 tahun, dari 6,75 tahun menjadi 6,76 tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Kabupaten Sambas rata-rata meningkat 0,30 persen per tahun dan mengalami percepatan dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,29 persen). Sementara RLS Kabupaten Sambas meningkat 0,19 persen per tahun selama periode 2020-2024. RLS 2024 juga melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,20 persen) yaitu hanya meningkat 0,01 tahun (0,15 persen).

c) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan Masyarakat Kabupaten Sambas mencapai Rp 11,538 juta per tahun. Capaian ini meningkat 481 ribu rupiah (4,35 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini masih cukup tinggi walaupun melambat dibanding tahun sebelumnya yang meningkat sebesar 5,69 persen (meningkat 595 ribu rupiah).

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sambas juga di dukung dengan capaian beberapa indikator lainnya yaitu :

a) Indeks Pembangunan Literasi

Pada tahun 2024 indeks pembangunan literasi kabupaten sambas telah mencapai target yang ditentukan sebesar 36 dan terealisasi sebesar 74,25 dengan capaian kinerja sebesar 200,19 persen. Capaian kinerja indeks pembangunan literasi berdasarkan data dari perpustakaan nasional yang memuat Indeks komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) antara lain pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan anggota perpustakaan.

b) **Tingkat Prestasi Pemuda**

Pada tahun 2024 tingkat prestasi pemuda belum mencapai target yang ditentukan sebesar 36 orang dengan realisasi sebesar 0 orang dengan capaian kinerja sebesar 0 persen. Tidak tercapainya tingkat prestasi pemuda dikarenakan tidak ada satupun peserta yang dikirim baik [emuda pelopor, PPAN da PPAP yang lolos ketahap selanjutnya. Selain itu, pembinaan PASKIBRAKA sudah dialihkan ke kantor Kesbangpolinmas yang mana kegiatan tersebut menargetkan 3 orang pemuda berprestasi.

c) **Tingkat prestasi olahraga**

Pada tahun 2024 tingkat prestasi olahraga telah mencapai target yang ditentukan sebesar 12 prestasi dengan realisasi sebesar 22 prestasi dengan capaian sebesar 183,33 persen. Pada tahun 2024 jumlah perolehan medali kabupaten sambas antara lain 8 medali pada ajang POPDA, 3 medali pada ajang SOERATIN tingkat daerah, 1 medali pada ajang SOERATIN tingkat nasional, 1 medali pada ajang PON, 1 medali pada ajang PRAPOPNAS dan 8 medali pada ajang PEPARNAS.

d) **Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)**

Pada tahun 2024 Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kabupaten Sambas ditargetkan sebesar 71,26 dan realisasi masih menunggu rilis BPS Kabupaten Sambas. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kabupaten Sambas Tahun 2023 adalah 88,37.

e) **Capaian Indikator Kabupaten layak Anak**

Pada tahun 2024 capaian indikator kabupaten layak anak telah mencapai target yang ditentukan sebesar 530 dan terealisasi sebesar 618,71 dengan capaian kinerja sebesar 116,7 persen. Keberhasilan capaian dapat dilihat dari nilai capaian indikator evaluasi kabupaten layak anak disetiap kluster terpenuhi dan melebihi target yang ditetapkan.

f) **Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)**





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2024 angka pravelensi kontrasepsi modern (mCPR) belum mencapai target yang ditentukan sebesar 60,9 dan terealisasi sebesar 59,2 dengan capaian kinerja 97,21 persen. Belum berhasilnya capaian ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi modern.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja indeks pembangunan manusia (IPM) antara lain :

- a) Dalam bidang kesehatan, upaya yang dilakukan adalah mengembangkan program “PROSESAR” yaitu Program Sehat Satono Rofie yang merupakan program pengobatan gratis kelas III bagi Masyarakat yang kurang mampu dan belum terdata di BPJS kesehatan. Selain itu, dalam rangka pencegahan kematian bayi dan balita, Pemerintah Kabupaten Sambas mendorong program Pemerintah melalui imunisasi dan pencegahan stunting.
- b) Dalam bidang pendidikan penguatan program guru penggerak, sekolah penggerak dan implementasi kurikulum yang sesuai dan melakukan edukasi publik kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu, memberikan bantuan beasiswa kepada Masyarakat kurang mampu dalam melanjutkan Pendidikan wajib 9 (sembilan) tahun.
- c) Dalam bidang mencapai kehidupan yang layak, upaya yang dilakukan adalah membuat segmentasi komoditas pada masyarakat atau daerah sehingga mencegahnaiknya nilai barang dan membuat daya beli masyarakat meningkat pada komoditas lain. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sambas mempunyai program “OVOP” yaitu program one village one produk atau satu desa satu produk lokal yang bersinergi dengan investasi. Melalui program OVOP dapat membuka kesempatan kerja setiap desa dan meningkatnya pendapatan di desa.
- d) Dalam bidang peningkatan literasi, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan umum khususnya pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah, peningkatan promosi perpustakaan dan mengadakan perlombaan dengan melibatkan masyarakat/siswa dalam peningkatan literasi di Kabupaten Sambas.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- e) Dalam bidang peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendataan, pembinaan pemuda kreatif, inovatif secara berkesinambungan dengan melibatkan lembaga masyarakat atau badan usaha yang mendukung kegiatan. Selain itu, memperbanyak event olahraga daerah sehingga memudahkan pencarian bibit unggul atlet berprestasi dan menyediakan sarana dan prasarana olahraga hingga ke desa-desa.
- f) Dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak, upaya yang dilakukan yaitu memberikan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan kepada perempuan dan pembentukan gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana SK Bupati Sambas nomor 800/DP3AP2KB/2017, membentuk puskesmas ramah anak pada 14 Puskesmas, membentuk satgas perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di 10 desa. Selain itu, peningkatan pelayanan KB melalui pembentuka kampung KB pada setiap desa.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 2 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	5.198.516.740	4.984.723.186	95,89
		Program Pengelolaan Pendidikan	165.150.099.875	158.444.748.605	95,94
		Program Pengembangan Kurikulum	247.346.782	27.205.000	11,00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	352.335.434.132	318.855.745.498	90,50
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	372.332.744	183.806.850	49,37
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.896.132.594	2.335.946.735	80,66
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.424.595.321	3.221.421.475	72,81





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Pembinaan Perpustakaan	2.850.921.300	2.774.162.886	97,31
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	60.802.892	59.824.937	98,39
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	235.999.426	233.073.155	98,76
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000	100.000.000	100
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.564.532.107	7.950.058.234	83,12
		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	134.083.689	115.806.000	86,37
		Program Perlindungan Perempuan	262.374.711	153.095.222	58,35
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Anak	13.885.116	13.885.116	100
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	288.937.352	164.013.036	56,76
		Program Pemenuhan Hak Anak	117.329.506	116.792.000	99,54
		Program Perlindungan Khusus Anak	238.523.867	233.430.854	97,86
		Program Pengendalian Penduduk	440.059.057	369.871.150	84,05
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.631.533.614	5.418.190.473	96,21
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.254.239.264	3.249.289.192	99,85
Realisasi Anggaran					91,91
Capaian Kinerja					100,28
Tingkat Efisiensi					8,37

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sambas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,91 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,28 persen maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,37 persen.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN 3: “Menurunnya Angka Kemiskinan”

“Menurunnya Angka Kemiskinan” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2024 didukung APBD dengan 6 (enam) program dengan anggaran sebesar Rp. 2.382.328.187,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.233.641.354,00 atau 95.82 persen dari yang telah dianggarkan.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 3 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 19
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kemiskinan	-	6.94	6.53	106,28%
2.	Indeks Gini	-	0.268	N/A	N/A
Jumlah Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Sasaran 3					N/A

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu angka kemiskinan dengan capaian kinerja 106,28 persen sedangkan indeks gini masih belum rilis data BPS.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun 2023		Capaian Kinerja 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Angka Kemiskinan	7,07	7,08	99,86%	6.94	6.53	106,28%
2.	Indeks Gini	0.270	0.256	105,46%	0.268	N/A	N/A

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,55 dan mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 6,42 jika dibanding tahun 2023. Sedangkan Indeks gini tahun 2024 masih belum rilis data BPS.

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3
Tahun 2021-2024

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kemiskinan	7,66	6.92	7,08	6.53
2.	Indeks Gini	-	0.256	0.256	N/A

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja angka kemiskinan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,13 dibanding tahun 2021. Sedangkan indeks gini tahun 2024 masih belum rilis BPS, pada tahun 2022-2023 indeks gini berada di nilai yang sama yaitu 0.256.

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Angka Kemiskinan	6.53	6,44	6,5 - 7,5
2	Indeks Gini	N/A	0.267	0,374 – 0,377

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja angka kemiskinan tahun 2024 baru mencapai 98,62 persen dari target akhir RPJMD. sedangkan indeks gini pada tahun 2024 masih belum rilis BPS.

Analisis keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 3, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Angka Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Kabupaten Sambas pada tahun 2024 adalah sebesar Rp528.017,- per kapita per bulan. Dibandingkan tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar 5,98 persen. Peningkatan atau penurunan Garis Kemiskinan tentunya akan berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,53 persen, turun 0,55 persen poin terhadap tahun 2023. Artinya, terdapat 6,53 persen penduduk Kabupaten Sambas yang pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sambas pada tahun 2024 mencapai 35,87 ribu orang mengalami penurunan 7,34 persen dibandingkan tahun 2023.

Beberapa faktor/fenomena yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Sambas selama tahun 2024 antara lain adalah :

- a) Sebagian besar penyaluran bansos dilakukan pada periode M1 Februari-M2 Maret 2024.
- b) Sebagian besar wilayah mengadakan sya'banan (tradisi acara makan bersama yang dilakukan di rumah-rumah) yang menyebabkan peningkatan konsumsi makanan jadi yang signifikan. Frekuensi dan intensitas meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas sya'banan ini juga meningkatkan transaksi jual-beli di pasar tradisional.
- c) Harga jual di level petani untuk komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet di sebagian besar Kecamatan.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja angka kemiskinan antara lain :





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- a) Memberikan bantuan kepada Masyarakat, baik dalam bidang pertanian dan perikanan agar bisa meningkatkan komoditas pertanian dan perikanan, mengingat pekerjaan utama Masyarakat di Kabupaten Sambas adalah petani dan nelayan.
- b) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait harga kelapa sawit dan karet yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya dan membuat regulasi agar harga sawit dan karet di Kabupaten Sambas stabil.
- c) Meningkatkan investasi di Kabupaten Sambas sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang besar bagi Masyarakat Kabupaten Sambas guna menekan meningkatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Sambas.

2. Indeks Gini

Indeks gini di Kabupaten Sambas dipengaruhi oleh indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan serta tingkat perlindungan sosial. Pada periode Maret 2023–Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Sambas mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sambas pada Maret 2024 sebesar 0,85, turun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 1,10. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,26 menjadi 0,19.

Selain itu, indeks gini dipengaruhi oleh tingkat perlindungan sosial yaitu tingkat jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial. Perlindungan sosial juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Perlindungan sosial dapat berupa jaminan kesehatan, jaminan pendapatan dasar, bantuan sosial, bantuan tunai, program keluarga harapan (PKH), program sembako, bantuan permukiman, bantuan lansia dan penyandang disabilitas. Dari 221.431 jiwa dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2024, terdapat 192.712 jiwa atau 87,03% telah mendapatkan perlindungan sosial. Realisasi ini meningkat dibandingkan tahun 2023 dimana perlindungan sosial mencakup 181.858 jiwa atau 80,75% dari jumlah





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tercatat dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial yaitu sebanyak 225.296 jiwa.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut antara lain belum optimalnya proses verifikasi usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana masih banyak yang terindikasi sebagai inclusion error. Hal ini berdampak pada pemberian bantuan sosial dalam rangka perlindungan sosial tidak tepat sasaran

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja indeks gini antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Desa serta mengoptimalkan proses verifikasi lapangan dan melakukan prosedur penghapusan data yang memang terbukti sebagai inclusion error dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Pemerintah Kabupaten Sambas mempunyai program unggulan yaitu program TEMA SIPINDU (Tingkat Ekonomi Masyarakat melalui Simpan PINjam terpaDU) dan Program Pemuda Siap Kerja. Kedua program tersebut merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sambas yang pembentukan program pembangunan yang menyasar penduduk berpendapatan rendah.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 3 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 23
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	47.130.610	47.081.300	99,90
		Program Rehabilitasi Sosial	580.970.897	572.017.628	98,46
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	742.309.293	624.142.163	84,08
		Program Penanganan Bencana	444.117.046	443.784.750	99,93





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	101.044.953	97.268.663	96,26
		Program Pemberdayaan Sosial	466.755.388	449.346.850	96,27
Realisasi Anggaran					95,82
Capaian Kinerja					N/A
Tingkat Efisiensi					N/A

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas persentase realisasi anggaran sebesar 95,82 persen namun realisasi capaian kinerja pada sasaran dan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat diukur dikarenakan data indeks gini masih belum rilis BPS tahun 2024.

SASARAN 4: “Menurunnya Tingkat Pengangguran ”

“Menurunnya tingkat pengangguran” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja”. Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2024 didukung APBD dengan 4 (empat) program dengan anggaran sebesar Rp 3.131.639.391,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 2.360.602.513,00 atau 75,38 persen dari anggarannya.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 4 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 24
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	5,0	4,99	100,20%

Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sudah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 5,0 persen dengan realisasi sebesar 4,99 persen dengan capaian 100,20 persen dan dikategorikan tercapai.

Tabel 25
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun 2023		Capaian Kinerja 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,16	5,04	62,69%	5,0	4,99	100,20%

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sambas Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,05 persen dibanding Tahun 2023 atau peningkatan capaian kinerja sebesar 37,51 persen.

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4
Tahun 2021-2024

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,97	5,08	5,04	4,99

Sumber : BPS Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sambas tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,02 persen dari tahun 2021.

Tabel 27
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,99	2,60	6 - 5,3

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2024





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sambas pada Tahun 2024 baru mencapai 52,10 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sambas lebih baik jika dibandingkan dengan target nasional yaitu 6-5,3 persen dan lebih rendah dari capaian realisasi nasional yaitu 4,91 persen.

Analisis keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 4, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Kabupaten Sambas adalah sebesar 4,99 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan Tahun 2023.

Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sambas di pengaruhi oleh beberapa kondisi antara lain :

a) Penyerapan angkatan kerja

Penyerapan angkatan kerja pada jenis pekerjaan formal belum meningkat secara signifikan. Pada tahun 2023, penduduk yang bekerja pada pekerjaan formal sebanyak 99.176 orang atau sebesar 29,90 persen dan meningkat sebanyak 6.910 orang atau sebesar 1,59 persen pada tahun 2024 menjadi 106.086 orang atau sebesar 31,49 persen. Sementara penyerapan angkatan kerja pada jenis pekerjaan informal pada Tahun 2024 sebesar 232.546 orang atau sebesar 70,10 persen.

b) Penduduk usia kerja (PUK)

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Sambas. Penduduk usia kerja pada tahun 2024 sebanyak 487,18 ribu orang, naik sebanyak 6,82 ribu orang dibanding tahun 2023. Sebagian





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 354,58 ribu orang (72,78 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 132,6 ribu orang.

c) Komposisi angkatan kerja

pada Agustus 2024 terdiri dari 336,89 ribu orang penduduk yang bekerja dan 17,69 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan tahun 2023, terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 5,26 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 5,16 ribu orang, sedangkan pengangguran naik sebanyak 98 orang.

d) Lapangan Pekerjaan

lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian sebesar 54,58 persen; selanjutnya adalah sektor Jasa-jasa sebesar 34,38 persen, dan sektor Manufaktur sebesar 11,04 persen. selain itu penduduk bekerja di Kabupaten Sambas paling banyak berstatus buruh/ karyawan/pegawai yaitu sebesar 28,62 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, yaitu sebesar 2,87 persen. Dibandingkan tahun 2023, status pekerjaan yang mengalami penurunan adalah berusaha sendiri (4,07 persen poin) dan pekerja keluarga/tidak dibayar (1,98 persen poin).

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja tingkat pengangguran terbuka antara lain :

- a) Pemerintah Kabupaten Sambas mempunyai program unggulan yaitu “Pemuda Siap Kerja” yaitu Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Memanfaatkan SDA yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dengan penerima sasaran adalah pencari kerja yang belum mendapat pekerjaan, penyandang disabilitas, warga binaan permasyarakatan RUTAN kelas II Sambas, calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan.
- b) Memperluas akses informasi terhadap kesempatan kerja yang ditawarkan oleh pemberi kerja melalui pemanfaatan porta informasi pasar kerja online yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- c) Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sambas maupun serikat pekerja / serikat buruh dengan aturan ketenagakerjaan khususnya hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 4 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 28
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Program Perencanaan Tenaga Kerja	40.365.364	40.247.000	99.71
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.264.267.922	791.733.945	62,62
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.460.922.532	1.163.988.600	79,67
		Program Hubungan Industrial	366.083.573	364.632.968	99,60
Realiasi Anggaran					75,38
Capaian Kinerja					100,20
Tingkat Efisiensi					24,82

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 75,38 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100,20 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 24,82 persen.

SASARAN 5

“Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana”

“Meningkatnya ketahanan gerhadap bencana” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “*mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan*





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

lingkungan.” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2024 didukung APBD dengan 3 (tiga) program dengan anggaran sebesar Rp 4,186.272.114 dan telah direalisasikan sebesar Rp 3.471.324.165 atau 82,92 persen dari anggarannya.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 5 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 29
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Resiko Bencana	-	150,72	134,55	112,02%

Sumber: Buku IRBI Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator Indeks Resiko Bencana telah mencapai target yang ditentukan sebesar 150,72 dengan realisasi sebesar 134,55 dengan capaian 112,02 persen dan dikategorikan tercapai.

Tabel 30
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun 2023		Capaian Kinerja 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Resiko Bencana	157,46	155,41	101,32%	150,72	134,55	112,02%

Sumber : Buku IRBI Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa indeks resiko bencana Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 20,86 dibanding tahun 2023 atau peningkatan capaian kinerja sebesar 10,7 persen.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 31
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5
Tahun 2021-2024

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Resiko Bencana	172,20	155,41	155,41	134,55

Sumber : Buku IRBI Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat indeks resiko bencana Kabupaten Sambas tahun 2024 mengalami peningkatan capaian sebesar 37,65 dari tahun 2021.

Tabel 32
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Indeks Resiko Bencana	134,55	139,05	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks resiko bencana Kabupaten Sambas pada Tahun 2024 telah mencapai target akhir RPJMD dengan realisasi sebesar 103,34 persen. Sedangkan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indikator indeks resiko bencana.

Analisis keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 5, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana, perhitungan tingkat risiko dilakukan dengan memperhatikan faktor *hazard*, *vulnerability*, dan *capacity*. Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian berdasarkan risiko bencana yang ada yang ditentukan oleh beberapa komponen antara lain :

a) indeks resiko bencana adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

IKD Kabupaten Sambas Tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan sebesar 0,63 dan terealisasi sebesar 0,66 dengan capaian





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

kinerja sebesar 104,80 persen. upaya yang dilakukan dalam pencapaian IKD Kabupaten Sambas antara lain :

- 1) Telah disusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sambas Tahun 2024-2028 yang telah dilegalisasi dengan Peraturan Bupati Sambas No. 103 Tahun 2024.
- 2) Telah disusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Sambas Tahun 2018-2022 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2019.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang diturunkan pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor 3 Tahun 2019.
- 4) Terbentuknya POSKO Penanganan Darurat Kebencanaan dan Kerelawanan yang terpusat di BPBD.
- 5) Tersentralisasinya Media Center Data dan Informasi Bencana Kabupaten/Kota di BPBD.
- 6) Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), yang hingga saat telah terbentuk sebanyak 62 desa yang tersebar di 19 kecamatan.
- 7) Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), yang hingga saat telah terbentuk sebanyak 62 desa yang tersebar di 19 kecamatan.
- 8) Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB), hingga saat ini telah diterapkan di tingkat SD sebanyak 5 unit, tingkat SLTP sebanyak 3 unit dan tingkat SLTA sebanyak 5 unit.
- 9) Penerapan Rumah Sakit/Puskesmas Aman Bencana, hingga saat ini telah diterapkan seluruh RS dan Puskesmas.
- 10) Terselenggaranya Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di hampir seluruh desa rawan bencana, terutama daerah rawan banjir dan kebakaran hutan dan lahan serta abrasi Pantai.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- 11) Terselenggaranya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana pada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Peduli Bencana atau Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Badan Pemadam Kebakaran Swasta (BPKS) serta Perusahaan.
 - 12) Terbentuknya Tim Reaksi Cepat Kabupaten maupun Tim Reaksi Cepat Organik BPBD.
- b) Kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW
- Kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Sambas Tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan sebesar 58 persen dan terealisasi sebesar 86 persen dengan capaian kinerja 148,28 persen. upaya yang dilakukan dalam pencapaian Kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Sambas antara lain melakukan revisi RTRW dan penyusunan RDTR di Kecamatan, melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengoptimalan alokasi dana untuk Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti Sisten Informasi Geografis (SIG) dan aplikasi perencanaan terintegrasi. Melalui pelatihan dan pengembangan SDM.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 5 dapat di lihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 33
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1.416.777.846	1.207.391.940	85,22
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.140.216.227	1.140.216.161	100
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.629.278.041	1.123.716.064	68,97
Realisasi Anggaran					82,92
Capaian Kinerja					112,02
Tingkat Efisiensi					29,10

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sambas Tahun 2024





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 82,92 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 112,02 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 29,10 persen.

SASARAN 6

“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur”

“Meningkatnya kualitas infrastruktur” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “*Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi.*” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas, Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2024 didukung APBD dengan 14 (empat belas) program dengan anggaran sebesar Rp. 359.818.677.836 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 216.846.683.587 atau 60,27 persen dari yang telah dianggarkan.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 6 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 34
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	-	73,10	74,45	101,85%

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap telah mencapai target yang ditentukan sebesar 73,10





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

persen dengan realisasi sebesar 74,45 dengan capaian 101,85 persen dan dikategorikan tercapai.

Tabel 35
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun 2023		Capaian Kinerja 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	71,08	72,09	101,42%	73,10	74,45	101,85%

Sumber : Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,36 dibanding tahun 2024 atau peningkatan capaian kinerja sebesar 0,43 persen.

Tabel 36
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 6
Tahun 2021-2024

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	70,61	71,90	72,09	74,45

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat persentase infrastruktur dalam kondisi mantap Kabupaten Sambas mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian sebesar 3,84 dari tahun 2021.

Tabel 37
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 6
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	74,45	76,27	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja persentase infrastruktur dalam kondisi mantap pada tahun 2024 baru mencapai





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

97,62 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indikator persentase infrastruktur dalam kondisi mantap.

Analisis keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 6, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap

Untuk mengukur capaian kinerja infratraktur dalam kondisi mantap ditentukan dengan capaian beberapa indikator kinerja antara lain :

a) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Jalan Kabupaten dalam Kondisi mantap adalah jalan kondisi jalan kabupaten dalam keadaan baik ditambah jalan kabupaten keadaan sedang. Indikator persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 73,70 persen dan dapat terealisasi sebesar 73,85 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,20 persen dan dikategorikan tercapai. Panjang jalan kabupaten yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 685 Tanggal 23 September 2015 adalah 1.102,206 km. Pada tahun 2024 panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 813.979 km dari panjang seluruh jalan kabupaten 1.102,206 km atau 73,85 persen.

b) Persentase Jalan poros desa dalam Kondisi mantap

Jalan poros desa dalam Kondisi mantap adalah jalan kondisi jalan poros desa dalam keadaan baik ditambah jalan poros desa keadaan sedang. Indikator persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 64,60 persen dan dapat terealisasi sebesar 66,21 persen dengan capaian kinerja sebesar 102,49 persen dan dikategorikan tercapai. Pada tahun 2024 jalan poros desa dalam kondisi mantap sepanjang 594.980 km dari panjang seluruh jalan poros desa di Kabupaten Sambas 898,626 km atau 66,21 persen.

c) Rasio jaringan irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan antara jumlah panjang sakuran primer, saluran sekunder dan saluran sub sekunder dalam kondisi baik dengan luas wilayah yang dilayani. Jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2024 ditargetkan 31,60 persen dan dapat terealisasi





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

sebesar 31,80 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,63 persen dan dikategorikan tercapai. Pada tahun 2024 jaringan irigasi yang telah dibangun sepanjang 2.306.514 m dari seluruh jaringan irigasi yang harus ditangani sepanjang 7.253.187,26.

- d) Rasio tersedianya dermaga /steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang

Rasio tersedianya dermaga /steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan sebesar 67,66 persen dan teralisasi sebesar 73 persen dengan capaian kinerja 107,89 persen dan dikategorikan tercapai. Tercapainya indikator kinerja ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah dermaga/steher yang dibangun, pada Tahun 2024 jumlah dermaga/steher yang dibangun sebanyak 389 dermaga/steher dan telah melebihi dari target 360 dermaga/steher, artinya dermaga/steher yang dibangun pada Tahun 2024 sebanyak 29 buah.

- e) Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak

Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 65,72 persen dan teralisasi sebesar 67,02 persen dengan capaian kinerja sebesar 101,98 persen dan dikategorikan tercapai. Tercapainya persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Sambas dikarenakan bertambahnya rumah tangga pengguna air bersih tahun 2024 sebesar 4.146 RT dari tahun 2023, jumlah total rumah tangga pengguna air bersih Tahun 2024 sebanyak 84.432 RT dari total rumah tangga sebanyak 125.981 RT.

- f) Persentase rumah tangga bersanitasi layak

persentase rumah tangga bersanitasi layak pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 84,12 persen dan dapat teralisasi sebesar 84,24 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,14 persen dan dikategorikan tercapai. Tercapainya Persentase rumah tangga bersanitasi layak didukung oleh sistem drainase yang layak dengan kondisi pembuangan





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

air tidak tersumbat. Jumlah penduduk yang mendapat drainase yang layak sebanyak 106.129 RT dari total rumah tangga 125.981 RT.

g) Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 80,40 persen dan dapat terealisasi sebesar 81,07 persen dengan capaian kinerja sebesar 100,83 persen dan dikategorikan tercapai. Pada tahun 2024 total rumah layak huni sebanyak 155.677 unit dari total seluruh rumah sebanyak 192.028 unit dan masih terdapat 36.351 rumah tidak layak huni di Kabupaten Sambas. Selain itu, rumah layak huni harus di dukung dengan permukiman yang layak melalui peningkatan jalan Lingkungan. Panjang jalan Lingkungan dalam kondisi baik Tahun 2024 sebesar 37.93 km dari total Panjang jalan Lingkungan.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap antara lain :

- a) Keterbatasan dana yang tersedia sehingga tidak dapat membangun semua infrastruktur yang telah ditargetkan.
- b) Faktor cuaca menjadi penghambat dalam mobilisasi material ke lokasi kegiatan dan memperlambat proses Pembangunan.
- c) Sebagian besar ruas-ruas jalan baik jalan kabupaten dan jalan desa sudah melampaui umur rencana.
- d) Kondisi cuaca yang membuat air pasang pada sungai memperlambat proses Pembangunan dan kondisi dermaga/steher yang mengalami kerusakan diakibatkan masih lemahnya pemeliharaan terhadap dermaga/steher yang telah dibangun.
- e) Masih terbatasnya daerah layanan akses air minum SPAM dengan jaringan perpipaan di Kabupaten Sambas. Untuk daerah yang tidak terjangkau dalam jaringan PDAM masih mengandalkan akses air minum menggunakan bukan jaringan perpipaan seperti sumur bor dan penampungan air hujan (PAH).
- f) Masih rendahnya persentase cakupan akses sanitasi layak yang ada di Kabupaten Sambas. Hal ini disebabkan pendanaan di sektor sanitasi





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

sebagian besar masih mengandalkan dana transfer pusat (DAK, Hibah, dll), sedangkan pendanaan yang berasal dari APBD masih sangat kecil.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja persentase jalan poros desa dalam kondisi mantap, antara lain :

- Memprioritas dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi skala prioritas dan mempercepat pelaksanaan kegiatan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai rencana dan tepat waktu
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dalam pembangunan jalan desa, sehingga target pembangunan jalan poros desa dapat terlaksana melalui dana desa.
- Melakukan rehabilitasi atau pemeliharaan dermaga/steher.
- Mengusulkan program-program strategis terkait pembangunan/ peningkatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) maupun Jaringan distribusi Ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi untuk melakukan pembangunan sarana penyaringan air bersih yang dapat menyaring air hujan sehingga bisa dijadikan konsumsi air minum.
- Membangun sarana sanitasi sebagai upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas rumah tangga bersanitasi layak di Kabupaten Sambas. Sarana sanitasi yang dibangun berupa tangki septik individual skala perdesaan.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 6 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 38
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 6

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	211.071.339.542	124.764.268.803	59,11
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.200.417.346	396.377.807	33,02
		Program Penataan Bangunan Gedung	9.155.054.438	5.996.560.656	65,60
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	3.074.261.539	2.266.653.032	73,73





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	50.272.065.976	26.337.535.364	52,39
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	29.005.770.189	21.984.297.628	75,79
		Program Pengelolaan Pelayaran	2.833.939.480	1.224.750.981	43,22
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	29.021.997.649	17.269.794.465	59,51
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.236.156.200	54.4954.987	44,08
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	9.811.245.770	4.842.022.000	49,35
		Program Pengembangan Permukiman	10.770.848.404	10.102.031.600	93,79
		Program Pengembangan Perumahan	456.033.614	245.912.728	53,92
		Program Kawasan Permukiman	874.504.782	673.614.336	77,30
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.035.042.907	197.909.200	19,12
Realisasi Anggaran					60,27
Capaian Kinerja					101,85
Tingkat Efisiensi					41,58

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 60,27 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,85 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 41,58 persen.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN 7

“Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”

“Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sambas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sambas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas dan Inspektorat Kabupaten Sambas. Untuk mewujudkan sasaran tersebut terlaksana melalui pelaksanaan 25 (dua puluh lima) program yang didukung dana APBD tahun 2024 sebesar Rp 336.884.886.146 yang telah terealisasi sebesar Rp 333.738.733.958 atau 99,07 persen dari pagu anggarannya.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 7 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 39
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	70 (BB)	75,6 (BB)	108%
2	Nilai SAKIP	-	70 (BB)	63,60 (B)	90,86%
3	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemda	-	WTP	N/A	N/A
Jumlah Rata-rata Persentase Capaian Sasaran 6					N/A

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja indeks reformasi birokrasi telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu mendapat nilai 75,6 dengan predikat “BB” dengan capaian kinerja 108 persen dan dikategorikan tercapai dan nilai SAKIP belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu mendapat predikat “BB” dan hanya memperoleh nilai 63,60 dengan predikat “B” dengan capaian kinerja 90,86 persen dan dikategorikan tidak tercapai. Sedangkan untuk capaian opini BPK terhadap laporan keuangan pemda masih dalam proses evaluasi.

Tabel 40
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun 2023		Capaian Kinerja 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	70 (BB)	70,44 (BB)	100,63%	70 (BB)	75,6 (BB)	108%
2.	Nilai SAKIP	70 (BB)	64,53 (B)	92,18%	70 (BB)	63,60 (B)	90,86%
3.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	WTP	WTP	100%	WTP	N/A	N/A

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa indeks reformasi birokrasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,16 persen dari tahun 2023 dan nilai SAKIP mengalami penurunan nilai sebesar 0,93 persen dari tahun 2023. Sedangkan untuk capaian opini BPK terhadap laporan keuangan pemda masih dalam proses evaluasi.

Tabel 41
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 7
Tahun 2021-2024

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	60,86	63,68	70,44	75,60
2.	Nilai SAKIP	61,32	63,34	64,53	63,60
3.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	N/A

Sumber : Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sambas dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan sebesar 14,74 persen dari tahun 2021 dan nilai SAKIP mengalami peningkatan sebesar 2,28 dari tahun 2021. Sedangkan untuk capaian opini BPK terhadap laporan keuangan pemda masih dalam proses evaluasi.

Tabel 42
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 7
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	75,6	80 (A)	Tidak Ada
2.	Nilai SAKIP	63,60	80 (A)	Tidak Ada
3.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	N/A	WTP	Tidak Ada

Sumber: Badan Perencanaan Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indeks reformasi birokrasi baru mencapai 94,5 persen dari target akhir RPJMD dan nilai SAKIP baru mencapai 79,5 persen dari target akhir RPJMD. Sedangkan untuk capaian opini BPK terhadap laporan keuangan pemda masih dalam proses evaluasi.

Analisis keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai sasaran 7, secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Tercapainya indeks reformasi birokrasi pada tahun 2024 dikarenakan perubahan indikator penilaian sebagaimana Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan capaian indikator kinerja pada RB General yang mengalami peningkatan. Adapun capaian indikator kinerja pada RB General adalah sebagai berikut :

- a) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada tahun 2024 mendapat skor index 1,8 poin dan mengalami peningkatan sebesar 1 poin dari tahun 2023. Peningkatan ini dikarenakan





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Sambas telah menetapkan Peraturan Bupati terkait Sistem Kerja.

- b) Tingkat Maturitas SPIP pada tahun 2024 mendapat nilai 3,02 dan mengalami peningkatan nilai sebesar 0,01 dari tahun 2023.
- c) Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI pada tahun 2024 mendapat skor index 0,5 poin dan mengalami peningkatan sebesar 0,5 poin dari tahun 2023. Peningkatan ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sambas telah menetapkan 2 (dua) perangkat daerah untuk diusulkan mendapat predikat WBK yaitu DPMPSTP dan DISDUKCAPIL namun tidak lolos verifikasi.
- d) Nilai SAKIP pada tahun 2024 mendapat nilai 63,56 dan mengalami penurunan nilai sebesar 0,93 dari tahun 2023.
- e) Tingkat Digitalisasi Arsip pada tahun 2024 mendapat nilai 91,73 dan mengalami peningkatan nilai sebesar 13,7 dari tahun 2023.
- f) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE pada tahun 2024 dan 2023 tidak mendapat nilai atau skor index 0. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sambas belum mempunyai arsitektur SPBE.
- g) Tingkat Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang diselesaikan pada tahun 2024 mendapat nilai yang sama dengan tahun 2023 dengan skor index 0,5 poin.
- h) Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun 2024 dan 2023 tidak mendapat nilai atau skor index 0. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sambas pada Tahun 2023 tidak mengikuti penilaian IKK dan pada Tahun 2024 tidak dilaksanakan penilaian oleh LAN.
- i) Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2024 mendapat nilai 77,96 dan mengalami peningkatan nilai sebesar 20,08 dari tahun 2023.
- j) Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektorial pada tahun 2024 mendapat nilai 2,69 dan mengalami peningkatan nilai sebesar 1,03 dari tahun 2023.
- k) Indeks Tata Kelola Pengadaan pada tahun 2024 mendapat nilai 71,27 dan mengalami peningkatan nilai sebesar 0,53 dari tahun 2023.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- l) Indeks Sistem merit pada tahun 2024 dan 2023 mendapat nilai yang sama yaitu 281,5. Hal ini dikarenakan untuk penilaian sistem merit pada tahun 2024 tidak dilaksanakan sehingga menggunakan nilai tahun 2023.
- m) Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 mendapat nilai 4,26 dan mengalami peningkatan nilai sebesar 1,47 dari tahun 2023.
- n) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada tahun 2024 mendapat nilai 89,61 dan mengalami peningkatan nilai sebesar 8,68 dari tahun 2023.
- o) Indeks SPBE pada tahun 2024 mendapat nilai 2,91 dan mengalami peningkatan nilai sebesar 0,26 dari tahun 2023.
- p) Opini BPK pada tahun 2024 mendapat predikat WTP. Predikat WTP ini merupakan Predikat WTP yang ke 7 secara berturut-turut.
- q) Tindaklanjut Rekomendasi pada tahun 2024 mendapat nilai 86,5 dan mengalami peningkatan nilai sebesar 4,4 dari tahun 2023.
- r) Indeks BerAKHLAK pada tahun 2024 mendapat nilai 67,39 dan mengalami peningkatan nilai sebesar 8,5 dari tahun 2023.
- s) Survei Penilaian Integritas pada tahun 2024 mendapat nilai 75,1 dan mengalami peningkatan nilai sebesar 0,8 dari tahun 2023.
- t) Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 mendapat nilai 86,36 dan mengalami peningkatan nilai sebesar 0,71 dari tahun 2023.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja indeks reformasi birokrasi antara lain :

- a) Melakukan tindaklanjut terhadap hasil catatan dan rekomendasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas.
- b) Melakukan perubahan dokumen ex-ante baik Road Map Reformasi Birokrasi maupun rencana aksi sebagaimana Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- c) Melakukan konsolidasi dengan perangkat daerah yang mengampu indikator penilaian RB General dan RB Tematik.
- d) Membentuk Tim kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana SK Bupati Sambas Nomor 21/SETDA-OR/2024.

2. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024 ditargetkan dengan nilai sebesar 70 atau Predikat “BB” dan terealisasi dengan nilai 63,60 dengan predikat “B” dengan capaian kinerja sebesar 90,86 persen dan dikategorikan belum tercapai.

Perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Sambas mengalami trend positif sejak 6 (enam) tahun terakhir yaitu tahun 2018 s.d 2023 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan kenaikan nilai sebesar 7,27. Namun pada Tahun 2024 Nilai SAKIP mengalami penurunan nilai sebesar 0,93 dibanding Tahun 2023. Predikat SAKIP Pemerintah Kabupaten Sambas mengalami peningkatan dari “CC” pada tahun 2018 meningkat menjadi “B” pada Tahun 2019 s.d 2024.

Grafik 8
Nilai SAKIP Kabupaten Sambas Tahun 2018-2024



Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kab. Sambas Tahun 2024*

Belum tercapainya indikator nilai SAKIP dipengaruhi oleh beberapa catatan temuan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, antara lain :





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- a) Pada indikator perencanaan kinerja, masih ditemukan kondisi kinerja yang belum sesuai levelnya sehingga indikatornya belum sepenuhnya memenuhi kriteria Spesifik, Measurable, Achievable, Relevance, Tomebound (SMART) dan Cukup. Selain itu masih ditemukan penetapan target kinerja pada dokumen tingkat Kabupaten maupun PD belum melihat capaian kinerja atas kondisi kinerja sebelumnya, cenderung stagnan atau mengalami kenaikan yang sangat kecil tanpa penjelasan yang cukup, sehingga target yang ditetapkan tidak menantang dan realistis dan perjenjangan/cascading kinerja yang tekah disusun belum mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan Critical Success Faktor (CSF) atas pencapaian kinerja.
- b) Pada indikator pengukuran kinerja, belum sepenuhnya indikator kinerja utama disertai definisi operasional khususnya pada Perangkat Daerah dan masih terdapat formulasi perhitungan indikator yang belum tepat dalam mengukur indikator kinerja utama. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sambas menggunakan aplikasi e-SAKIP, namun mplementasi media tersebut belum maksimal dalam pengukuran capaian kinerja khususnya level organisasi atau PD karena bersifat sebagai media pengumpulan dokumen AKIP.
- c) Pada indikator Pelaporan kinerja, laporan kinerja Pemda dan PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, diantaranya tentang simpulan capaian seluruh sasaran kinerja, *benchmark* kinerja dan rekomendasi perbaikan kinerja kedepan dan masih ditemukan informasi kinerja yang telah dituangkan dalam laporan kinerja khususnya pada PD belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepannya.
- d) Pada indikator evaluasi akuntabilitas kinerja internal, hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menyasar





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP. Selain itu, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja. Hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kinerja yang capaian kinerjanya belum sesuai.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja nilai SAKIP antara lain :

- a) Melakukan identifikasi indikator-indikator pada level indikator sasaran maupun program yang tidak memenuhi kriteria Spesifik, Measurable, Achievable, Relevance, Tomebound (SMART) dan cukup pada RPJMD namun perbaikan hanya dapat dilakukan penyempurnaan pada dokumen RKPD atau Renja tahunan dikarenakan Tahun 2024 ini adalah tahun akhir periode RPJMD dan tahun serentak penyusunan dokumen perencanaan daerah baik RPJPD dan RPJMD.
- b) Melakukan identifikasi target kinerja pada level Kabupaten dan Perangkat Daerah, namun hanya dapat dilakukan penyempurnaan target kinerja pada dokumen RKPD atau Renja Tahunan dikarenakan tahun 2024 ini adalah tahun akhir periode RPJMD, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan target kinerja pada RPJMD.
- c) Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan pohon kinerja Tingkat Kabupaten dan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan pohon Kinerja telah mempertimbangkan CSF dalam setiap penjabaran antar tingkat Kinerja sehingga pencapaian Kinerja di atas akan dipengaruhi oleh tingkat Kinerja dibawahnya. Setelah itu, melakukan identifikasi Kembali crosscutting Kinerja yang melibatkan keseluruhan PD.
- d) Melakukan reviu dan penyempurnaan kualitas indikator kinerja pada level pemda hingga ke seluruh perangkat daerah.
- e) Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait replikasi aplikasi e-SAKIP Provinsi Kalbar.
- f) Melakukan penyempurnaan laporan kinerja perangkat daerah dan pemanfaatan laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- g) Memberikan dan mempertajam temuan serta rekomendasi yang lebih mendetil berdasarkan checklist kelengkapan dokumen pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat memberikan solusi perbaikan yang nyata dan efektif terkait hal-hal yang menjadi kekurangan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
- h) Melakukan ekspose dengan memanggil OPD terkait hasil dari evaluasi AKIP OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Sambas dan Mendorong agar OPD menindaklanjuti rekomendasi serta saran perbaikan atas hasil evaluasi AKIP.

3. Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemda

Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda Tahun 2024 ditargetkan mendapat Predikat “WTP”, namun sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda dipengaruhi oleh beberapa indikator antara lain :

a) Tingkat Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Tingkat sistem pengelolaan dan aset daerah kabupaten sambas pada tahun 2024 dengan kategori tinggi dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. Tingginya capaian tingkat sistem pengelolaan dan aset daerah dipengaruhi oleh peningkatan kualitas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dengan berlandaskan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan. Selain itu, implementasi aplikasi pertauran BMD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 dan telah dilakukan pengamana terhadap asset tanah melalui penerbitan sertifikat bekerja sama dengan BPN Kabupaten Sambas.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

b) Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) Terintegrasi

Maturitas sistem penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Sambas telah mendapat Nilai 3,017 atau telah memenuhi karakteristik maturitas SPIP pada level 3 (terdefinisi). Pada tahun 2024 tingkat maturitas SPIP terintegrasi telah mencapai target yang telah ditentukan dengan nilai 2,8 dengan capaian kinerja 107,75 persen. keberhasilan capaian tingkat maturitas SPIP pada level 3 dipengaruhi oleh langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah sesuai dengan pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Selain itu, karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa hal yang perlu perbaikan yaitu pada kualitas perencanaan daerah, serta pengendalian internal telah dilaksanakan namun belum optimal.

Hambatan/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda antara lain :

- 1) masih terdapat barang milik daerah khususnya aset tanah yang bermasalah dengan pihak lain.
- 2) Pada aspek perencanaan masih terdapat sasaran strategis Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan isu strategis daerah atau belum menjawab permasalahan yang akan ditangani oleh pemerintah daerah secara spesifik dan sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi *outcome*. selain itu, serta pengendalian internal yang di bangun dan diimplementasikan belum sepenuhnya memadai pada setiap program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda antara lain :





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- Memperluas cakupan dan konsistensi pelaksanaan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja daerah berdasarkan bukti dokumen yang valid dan sah dan transaksi non RKUD.
- Percepatan penyampaian revidi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas unaudit kepada BPK.
- Pelaksanaan bimbingan teknis kepada aparatur pengelola BMD dan percepatan sertifikasi asset tanah melalui sinergitas bersama pengacara neara dalam penanganan asset yang sengketa.
- Merumuskan sasaran strategis pemerintah daerah yang secara spesifik merupakan isu strategis yang ingin ditangani dan memastikan bahwa sasaran pada setiap level perencanaan yang ditetapkan merupakan penjabarn atas sasaran pada level atasnya dengan memperhatikan *critical success factor* (CSF);
- Membangun dan mengimplementasikan pengendalian internal secara menyeluruh dan memadai pada setiap program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 7 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 43
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 7

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governanve	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah	35.832.703.330	34.812.788.347	97,15
		Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	21.138.661.522	20.924.054.478	98,98
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.329.089.629	2.950.294.662	88,62
		Program Pengelolaan Perbatasan	60.589.979	60.367.479	99,63
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat DPRD	32.431.679.684	31.718.210.919	97,80
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.166.960.187	17.537.300.562	79,11





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Kepegawaian Daerah	2.224.871.249	2.202.102.649	98,98
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	531.277.320	506.209.383	95,28
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.754.879.720	1.670.335.981	95,18
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.201.666.454	605.611.937	50,40
		Program Pendaftaran Penduduk	1.998.568.052	1.972.355.371	98,69
		Program Pencatatan Sipil	625.001.648	624.149.914	99,86
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.180.474.009	1.162.443.982	98,47
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	133.673.303	88.760.565	66,40
		Program Aplikasi Informatika	896.985.188	696.497.993	77,65
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	850.830.579	84.4961.633	99,31
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	341.322.296	329.610.207	96,57
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	184.490.627	179.842.638	97,48
		Program Pengelolaan Arsip	112.601.9700	110.490.735	98,13
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	494.583.650	469.238.797	94,88
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	316.999.613.614	315.122.913.697	99,41
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.555.434.086	1.446.525.418	93,00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.361.032.569	3.333.658.021	99,18
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.096.997.673	2.068.183.636	98,63
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	340.582.139	304.841.401	89,51
Realisasi Anggaran					99,07
Capaian Kinerja					N/A
Tingkat Efisiensi					N/A





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas persentase realisasi anggaran sebesar 99,07 persen namun realisasi capaian kinerja pada sasaran dan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat diukur dikarenakan hasil Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemda belum dirilis.

SASARAN 8

“Meningkatnya Status Kemajuan Mandiri”

“Meningkatnya Status kemajuan mandiri” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “*Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan local dan investasi.*” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2024 didukung APBD dengan 6 (enam) program dengan anggaran sebesar Rp 4.638.012.173 dan telah direalisasikan sebesar Rp 4.668.271.046 atau 99,35 persen dari anggarannya.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 8 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 44
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Desa Mandiri	Desa	189	189	100%

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah desa mandiri telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 189 desa dengan realisasi sebesar 189 desa dengan capaian 100 persen dan dikategorikan tercapai.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 45
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun 2023		Capaian Kinerja 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Jumlah Desa Mandiri	95	168	176,84%	189	189	100%

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat jumlah desa mandiri pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 17 desa jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Tabel 46
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 8
Tahun 2021-2024

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Desa Mandiri	65	119	168	189

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah desa mandiri mengalami peningkatan yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah desa mandiri pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan sebanyak 124 Desa jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Tabel 47
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 8
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Jumlah Desa Mandiri	189	140	Tidak Ada

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa realisasi jumlah desa mandiri pada tahun 2024 telah melebihi dari target akhir RPJMD dengan capaian kinerja 189 persen dan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian jumlah desa mandiri Kabupaten Sambas. Mengingat capaian desa mandiri Kabupaten





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Ssambas telah melebihi target RPJMD maka akan dilakukan penyesuaian target pada perjanjian kinerja Tahun 2025.

Analisis keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai target dan realisasi sasaran 8 sebagaimana tabel diatas, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Desa Mandiri

Berdasarkan penetapan status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2024 di Kabupaten Sambas, dari 195 desa terdapat 189 desa dengan status desa mandiri dan 6 desa dengan status desa maju. Artinya, pada Tahun 2024 di Kabupaten Sambas tidak terdapat lagi desa berkembang dan desa tertinggal.

Pemerintah Kabupaten Sambas mendapat peringkat pertama dengan capaian kemajuan desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat dan peringkat 13 nasional. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan status desa mandiri dilakukan dengan sinergitas bersama dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain :

- a) Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa.
- b) Melaksanakan rapat Koordinasi, pelatihan dan verifikasi dalam rangka pemutakhiran data IDM di Kabupaten Sambas tahun 2024 kepada 195 operator IDM Desa se-Kabupaten Sambas.
- c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke desa di Kabupaten Sambas dalam rangka pengawalan perencanaan pembangunan dalam peningkatan status IDM tahun 2024. Monitoring dan evaluasi ke desa di Kabupaten Sambas dilaksanakan di 19 Kecamatan.
- d) Menyusun E-Book/Laporan IDM Kabupaten Sambas yang merupakan laporan hasil pemutakhiran IDM di Kabupaten Sambas tahun 2024.

Selain itu, kemajuan desa mandiri juga dipengaruhi oleh persentase satuan permukiman transmigrasi menuju tahap kemandirian yang mana pada tahun 2024, Pemerintah kabupaten sambas telah mencapai 34 indikator dari 48 indikator indeks perkembangan satuan permukiman atau





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

70,83 persen, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 2,08 persen jika dibanding tahun 2023. Pada Tahun 2024 Persentase satuan permukiman transmigrasi menuju tahap kemandirian belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas sebesar 71 persen dan terealisasi sebesar 70,83 persen dengan capaian kinerja 99,76 persen.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan jumlah desa mandiri di Kabupaten Sambas antara lain :

- a) Minimnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran status IDM dan kurangnya dukungan dan Intervensi perangkat daerah dalam peningkatan status Desa Mandiri di Kabupaten Sambas.
- b) Masih ada pemahaman yang salah terhadap status desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
- c) Masih terdapat beberapa kawasan transmigrasi yang dalam proses identifikasi di karenakan dalam areal lahan transmigrasi yang telah terbit SK dan sertifikat HPL tahun 2019 (719,226 ha) terindikasi lahan diluar lahan perkarangan (50 ha) dan calon lahan usaha (137 ha) merupakan lahan milik masyarakat setempat yang tidak menyerahkan tanahnya untuk program transmigrasi.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja jumlah desa mandiri antara lain :

- 1) Memasukkan program/kegiatan pembangunan desa dalam renja perangkat daerah, menguatkan desa agar memaksimalkan anggaran desa dalam mewujudkan kemandirian desa.
- 2) Bekerjasama dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat P3MD Kabupaten Sambas membuat dashboard progres pemutakhiran Data IDM di Kabupaten Sambas yang menyajikan rekomendasi per perangkat daerah untuk melakukan intervensi dalam meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa. Selain itu memberikan Reward kepada Desa yang telah mencapai status desa mandiri dari Pemerintah Kabupaten Sambas.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- 3) Melakukan pengusulan ke kantor pertanahan terkait penerbitan sertifikat hak milik lahan usaha dikawasan transmigrasi.

Capaian prestasi yang diraih oleh Kabupaten Sambas Tahun terkait IDM di Kabupaten Sambas Tahun 2024, yang terdiri dari :

- Penghargaan kepada Bupati Sambas dari Menteri Desa PDTT RI atas Komitmen dan Kerja Keras Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Desa Sehingga Seluruh Desa di Kabupaten Sambas Mencapai Status Mandiri dan Maju;
- Penghargaan kepada Bupati Sambas dari Gubernur Kalimantan Barat atas Prestasi Kabupaten Mengentaskan Desa Berkembang Tahun 2024.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 8 dapat di lihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 48
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 8

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Status Kemajuan Mandiri	Program Peningkatan Kerjasama Desa	17.925.690	17.777.750	99,17
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.191.628.773	3.183.997.040	99,76
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.458.716.583	1.436.237.383	98,46
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	173.334.757	171.510.210	98,95
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	364.711.182	216.221.500	59,29
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	321.849.042	319.486.813	99,27
Realisasi Anggaran					96,69
Capaian Kinerja					100
Tingkat Efisiensi					79,89

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,35 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,31 persen.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN 9

“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

“Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup” merupakan sasaran strategis untuk mencapai misi “*Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.*” Tingkat keberhasilan sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas. Untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2024 didukung APBD dengan 6 (enam) program dengan anggaran sebesar Rp 15.665.258.729 dan telah direalisasikan sebesar Rp 14.178.916.926 atau 90,51 persen dari anggarannya.

Adapun capaian indikator kinerja pada Sasaran 9 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 49
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	73,98	67,56	91,32%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai target yang telah ditentukan sebesar 73,98 dengan realisasi sebesar 67,56 dengan capaian 91,32 persen dan dikategorikan tidak tercapai.

Tabel 50
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun 2023		Capaian Kinerja 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja 2024
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,75	71,31	108,46%	73,98	67,56	91,32%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Sambas Tahun 2024





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten sambas pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,75 jika dibandingkan dengan tahun 2023 atau mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 17,14 persen.

Tabel 51
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 9
Tahun 2021-2024

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualias Lingkungan Hidup	69,51	67,20	71,31	67,56

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sambas reaktif membaik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, namun mengalami penurunan sebesar 3,75 pada tahun 2024.

Tabel 52
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 9
dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,56	66,50	Tidak Ada

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa masih indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sambas tahun 2024 telah mencapai target akhir RPJMD dengan capaian 101,60 persen dan tidak terdapat target nasional dalam pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sambas.

Analisis keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mencapai target dan realisasi sasaran 9 sebagaimana tabel diatas, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2024, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sambas mengalami penurunan sebesar 3,75 poin dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat per media lingkungan, penurunan nilai IKLH disebabkan oleh adanya penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) sedangkan Indeks Kualitas Tutup Lahan (IKTL) mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya. Perhitungan nilai IKLH Kabupaten Sambas Tahun 2024 diperoleh dari 32 lokasi pemantauan kualitas air, 8 lokasi pemantauan kualitas udara dan 1 data pemantauan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Sambas.

Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pemerintah Kabupaten Sambas dipengaruhi oleh :

a) Indeks Kualitas Air (IKA)

Pada Tahun 2024, Nilai IKA Kabupaten Sambas sebesar 58,75 dengan kategori sedang dan mengalami penurunan sebesar 6,25 dibanding tahun 2023 dengan nilai IKA 65. Menurunnya IKA Kabupaten Sambas dikarenakan masih tingginya pencemaran air yang bersumber dari limbah domestik, limbah pertanian, limbah peternakan maupun limbah industri yang bermuara ke sungai dan beberapa titik pantau juga mengalami penurunan status mutunya.

b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pada Tahun 2024, Nilai IKU Kabupaten Sambas sebesar 89,29 dengan kategori baik dan mengalami penurunan sebesar 4,46 dibanding tahun 2023 dengan nilai IKU 93,75. Menurunnya IKU Kabupaten Sambas dikarenakan pada saat pemasangan Passive Sampler, kondisi cuaca dilapangan sebagian besar dalam kondisi cerah. Selain itu, musim kemarau dapat mempengaruhi kualitas udara ambien karena tidak terjadi





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

proses peluruhan polutan di udara yang dapat menyebabkan terakumulasinya polutan udara dan penurunan kualitas udara.

c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Pada Tahun 2024, Nilai IKTL Kabupaten Sambas sebesar 42,49 dengan kategori kurang dan mengalami peningkatan sebesar 1,83 dibanding tahun 2023 dengan nilai IKTL 40,66. Meningkatnya IKTL Kabupaten Sambas dikarenakan adanya perubahan luasan tutupan lahan seperti luas belukar dalam kawasan dan luas belukar pada fungsi lindung sedangkan tutupan lahan lainnya seperti luas hutan, ruang terbuka hijau, tutupan vegetasi lainnya, rehabilitasi hutan dan lahan serta dampak kebakaran dan kanal mengalami penurunan.

Upaya dan langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja indikator indeks kualitas lingkungan hidup antara lain :

- a) Pemahaman masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup yang terkait dengan wilayahnya perlu di tingkatkan agar masyarakat mampu mencermati dan mengkritisi berbagai aktifitas yang akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, seperti pembangunan pusat aktivitas baru (pabrik, industri, pertokoan, pusat perbelanjaan)
- b) Melakukan normalisasi sungai dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di bantaran sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai. Selain itu, meningkatkan peran pelaku usaha/kegiatan dalam pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar, meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pembuangan air limbah atau limbah domestik pelaku usaha/kegiatan serta perlunya sosialisasi kepada petani untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia saat musim hujan.
- c) Pengadaan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) secara online dan kontinyu dari APBN Kementerian Lingkungan Hidup/Badan





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengendalian Lingkungan Hidup dan perlunya pengadaan mobile AQMS.

- d) Melakukan peningkatan kapasitas staf dalam pengendalian tutupan lahan dan melakukan inventarisasi RTH publik dan RTH privat.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 9 dapat di lihat dari tabel sebagaimana berikut :

Tabel 53
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 9

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Status Kemajuan Mandiri	Program Pengelolaan Persampahan	10.304.087.778	10.025.536.790	97,30
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	412.314.965	394.960.278	95,79
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	23.843.150	23.490.000	98,52
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.340.456.746	3.259.857.350	75,10
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	257.880.707	255.617.330	99,12
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	326.675.383	219.455178	67,18
Realisasi Anggaran					90,51
Capaian Kinerja					91,32
Tingkat Efisiensi					0,81

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Sambas Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 90,51 persen dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 91,32 persen, maka pada sasaran ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,81 persen.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.3 Realisasi Anggaran

3.3.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 yang diuraikan pada Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024 ini merupakan LRA Per 31 Desember Tahun 2024 yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah dan belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

a. Pendapatan Daerah:

<i>Target Tahun 2024</i>	<i>Realisasi Tahun 2024</i>	<i>%</i>
Rp 2.227.273.773.629	Rp 2.102.272.191.827,69	94,39

Rincian per jenis pendapatan dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

<i>Target Tahun 2024</i>	<i>Realisasi Tahun 2024</i>	<i>%</i>
Rp 312.334.477.478	Rp 229.120.841.939,69	73,36

Berdasarkan target dan realisasi PAD di atas, capaian kinerja PAD Tahun 2024 sebesar 73,36 persen. Rincian PAD Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 54
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024

Jenis Pendapatan	Target Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%
Pajak Daerah	51.964.431.990	49.427.529.725,56	95,12
Hasil Restribusi Daerah	4.124.800.000	4.889.915.339	118,79
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.707.885.391	3.707.885,391	100
Lain-lain PAD yang sah	252.537.360.097	171.085.511.483,13	67,75
Jumlah	312.334.477.478	220.120.841.939,56	73,36

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

2) Pendapatan Transfer

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
Rp 1.913.811.296.151	Rp. 1.872.025.231.888	97,82

Berdasarkan target dan realisasi dana pendapatan transfer, capaian kinerja pendapatan transfer tahun 2024 sebesar 97,82 persen, dengan rincian dana perimbangan tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 55
Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2024

Jenis Pendapatan	Target Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%
Transfer Pemerintah Pusat	1786.621.140.443	1.772.304.383.948	99,20
Transfer Antar Daerah	127.190.155.708	99.720.847.940	78,40
Jumlah	1.913.811.296.151	1.872.025.231.888	97,82

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
Rp 1.128.000.000	Rp. 1.126.118.000	99,83

Berdasarkan target dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di atas, capaian kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 sebesar 99,83 persen. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 56
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024

Jenis Pendapatan	Target Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%
Pendapatan Hibah	1.128.000.000	1.126.118.000	99,83
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
Jumlah	1.128.000.000	1.126.118.000	99,83

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

b. Belanja Daerah

Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%
Rp 2.235.588.987.917	Rp 1.978.071.807.106,53	88,48

Berdasarkan target dan realisasi Belanja Daerah di atas, capaian kinerja Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar 88,48 persen. Keberhasilan kinerja sasaran tahun 2024 didukung oleh tersedianya input berupa anggaran belanja dalam APBD. Dukungan anggaran tersebut dalam bentuk belanja operasi dan belanja modal.

Tabel 57
Rincian Belanja Daerah pada Tahun 2024

Jenis Belanja	Target Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%
Belanja Operasi	1.533.342.829.012	1.390.981.011.723,28	90,72
Belanja Modal	400.274.868.196	286.839.372.979,25	71,66
Belanja Tidak Terduga	1.068.832.516	150.475.000	14,08
Belanja Transfer	300.902.458.193	300.100.947.354	99,73
Jumlah Belanja Daerah	2.235.588.987.917	1.978.071.807.106,53	88,48

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024

3.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024

RPJMD Kabupaten Sambas menetapkan bahwa pada dasarnya seluruh belanja daerah ditujukan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sambas. Sesuai definisi belanja tidak langsung, belanja ini diperuntukkan bagi setiap program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan program yang mendukung masing-masing sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sambas, berikut disajikan anggaran dan realisasi belanja untuk setiap sasaran pada tahun 2024.





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 58

Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Sasaran : Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah			
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.275.367.314	3.250.210.369	99,23
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	7.165.000	7.165.000	100
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	18.536.000	18.459.006	99,58
4	Program Pengembangan Ekspor	95.063.219	94.634.419	99,55
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.3563.96.746	1.060.747.288	78,20
6	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	560.747.408	559.317.882	99,75
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1467.534.768	146.6646.510	99,94
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.702.216.363	2.845.124.076	76,85
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	37.204.493.618	30.665.161.194	82,42
10	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	75.680.110	58.389.280	77,15
11	Program Perizinan Usaha Pertanian	603.017.765	482.095.648	79,95
12	Program Penyuluhan Pertanian	2.174.228.522	1.432.596.631	65,89
13	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.097.678.268	4.524.119.101	88,75
14	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.521.530.580	2.198.200.320	87,18
15	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	217.790.868	187.369.095	86,03
16	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	80.9495.829	646.470.513	79,86
17	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.026.959.559	344.499.759	33,55
18	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	381.150.000	374.754.072	98,32
19	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.103.149.888	2.077.214.633	98,77





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
20	Program Pemasaran Pariwisata	625.911.972	624.277.067	99,74
21	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	99.999.972	996.167	9,96
22	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	132.500.108	132.331.508	98,87
23	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	82.633.181	81.142.514	98,20
24	Program Promosi Penanaman Modal	21.163.984	21.156.961	99,97
25	Program Pelayanan Penanaman Modal	175.229.777	171.924.967	98,11
26	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	453.859.080	449.359.377	99,01
27	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	47.645.824	47.545.603	99,79
28	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	44.088.000	43.304.600	98,22
29	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	100.221.000	99.460.742	99,24
30	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	264.669.544	264.629.356	99,98
31	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	121.808.864	121.300.064	99,58
32	Program Pengembangan UMKM	523.720.744	457.487.986	87,35
33	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	880.650.690	686.008.692	77,19
Jumlah Sasaran 1		65.391.653.875	54.817.057.213	83,83
2.	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
1	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	5.198.516.740	4.984.723.186	95,89
2	Program Pengelolaan Pendidikan	165.150.099.875	158.444.748.605	95,94
3	Program Pengembangan Kurikulum	247.346.782	27.205.000	11,00
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	352.335.434.132	318.855.745.498	90,50
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	372.332.744	183.806.850	49,37





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.896.132.594	2.335.946.735	80,66
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.424.595.321	3.221.421.475	72,81
8	Program Pembinaan Perpustakaan	2.850.921.300	2.774.162.886	97,31
9	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	60.802.892	59.824.937	98,39
10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	235.999.426	233.073.155	98,76
11	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000	100.000.000	100
12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.564.532.107	7.950.058.234	83,12
13	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	134.083.689	115.806.000	86,37
14	Program Perlindungan Perempuan	262.374.711	153.095.222	58,35
15	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Anak	13.885.116	13.885.116	100
16	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	288.937.352	164.013.036	56,76
17	Program Pemenuhan Hak Anak	117.329.506	116.792.000	99,54
18	Program Perlindungan Khusus Anak	238.523.867	233.430.854	97,86
19	Program Pengendalian Penduduk	440.059.057	369.871.150	84,05
20	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.631.533.614	5.418.190.473	96,21
21	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.254.239.264	3.249.289.192	99,85
Jumlah Sasaran 2		553.817.680.089	509.005.089.604	91,91
3.	Sasaran : Menurunnya angka kemiskinan			
1	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	47.130.610	47.081.300	99,90
2	Program Rehabilitasi Sosial	580.970.897	572.017.628	98,46
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	742.309.293	624.142.163	84,08
4	Program Penanganan Bencana	444.117.046	443.784.750	99,93
5	Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	101.044.953	97.268.663	96,26





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
6	Program Pemberdayaan Sosial	466.755.388	449.346.850	96,27
Jumlah Sasaran 3		2.382.328.187	2.233.641.354	95,82
4.	Sasaran : Menurunnya Tingkat Pengangguran			
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	40.365.364	40.247.000	99,71
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.264.267.922	791.733.945	62,62
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.460.922.532	1.163.988.600	79,67
4.	Program Hubungan Industrial	366.083.573	364.632.968	99,60
Jumlah Sasaran 4		3.131.639.391	2.360.602.513	75,38
5.	Sasaran : Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana			
1	Program Penanggulangan Bencana	1.416.777.846	1.207.391.940	85,22
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.140.216.227	1.140.216.161	100
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.629.278.041	1.123.716.064	68,97
Jumlah Sasaran 5		4.186.272.114	3.471.324.165	82,92
6.	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur			
1	Program Penyelenggaraan Jalan	211.071.339.542	124.764.268.803	59,11
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.200.417.346	396.377.807	33,02
3	Program Penataan Bangunan Gedung	9.155.054.438	5.996.560.656	65,60
4	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	3.074.261.539	2.266.653.032	73,73
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	50.272.065.976	26.337.535.364	52,39
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	29.005.770.189	21.984.297.628	75,79
7	Program Pengelolaan Pelayaran	2.833.939.480	1.224.750.981	43,22
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	29.021.997.649	17.269.794.465	59,51
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.236.156.200	54.4954.987	44,08





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	9.811.245.770	4.842.022.000	49,35
11	Program Pengembangan Permukiman	10.770.848.404	10.102.031.600	93,79
12	Program Pengembangan Perumahan	456.033.614	245.912.728	53,92
13	Program Kawasan Permukiman	874.504.782	673.614.336	77,30
14	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.035.042.907	197.909.200	19,12
Jumlah Sasaran 6 :		359.816.677.836	216.846.683.587	60,27
7.	Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah	35.832.703.330	34.812.788.347	97,15
2	Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	21.138.661.522	20.924.054.478	98,98
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.329.089.629	2.950.294.662	88,62
4	Program Pengelolaan Perbatasan	60.589.979	60.367.479	99,63
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sekretariat DPRD	32.431.679.684	31.718.210.919	97,80
6	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.166.960.187	17.537.300.562	79,11
7	Program Kepegawaian Daerah	2.224.871.249	2.202.102.649	98,98
8	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	531.277.320	506.209.383	95,28
9	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.754.879.720	1.670.335.981	95,18
10	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.201.666.454	605.611.937	50,40
11	Program Pendaftaran Penduduk	1.998.568.052	1.972.355.371	98,69
12	Program Pencatatan Sipil	625.001.648	624.149.914	99,86
13	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.180.474.009	1.162.443.982	98,47
14	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	133.673.303	88.760.565	66,40
15	Program Aplikasi Informatika	896.985.188	696.497.993	77,65





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
16	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	850.830.579	84.4961.633	99,31
17	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	341.322.296	329.610.207	96,57
18	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	184.490.627	179.842.638	97,48
19	Program Pengelolaan Arsip	112.601.9700	110.490.735	98,13
20	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	494.583.650	469.238.797	94,88
21	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	316.999.613.614	315.122.913.697	99,41
22	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.555.434.086	1.446.525.418	93,00
23	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.361.032.569	3.333.658.021	99,18
24	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.096.997.673	2.068.183.636	98,63
25	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	340.582.139	304.841.401	89,51
Jumlah Sasaran 7 :		336.884.886.146	333.738.733.958	99,07
8.	Sasaran : Meningkatnya Status Kemajuan Desa			
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	17.925.690	17.777.750	99,17
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.191.628.773	3.183.997.040	99,76
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.458.716.583	1.436.237.383	98,46
4	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	173.334.757	171.510.210	98,95
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	364.711.182	216.221.500	59,29
6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	321.849.042	319.486.813	99,27
Jumlah Sasaran 8 :		4.638.012.173	4.668.271.046	99,35
9.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
1	Program Pengelolaan Persampahan	10.304.087.778	10.025.536.790	97,30
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	412.314.965	394.960.278	95,79
3	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	23.843.150	23.490.000	98,52





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Program yang dilaksanakan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.340.456.746	3.259.857.350	75,10
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	257.880.707	255.617.330	99,12
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	326.675.383	219.455.178	67,18
Jumlah Sasaran 9 :		15.665.258.729	14.178.916.926	90,51

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024





BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan *good governance* tahun Ketiga dan tahun terakhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sambas sebagaimana ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Tujuan penyusunan laporan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan gambaran terhadap tingkat pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Sambas yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 12 (dua belas) indikator kinerja, maka dapat dilihat bahwa beberapa indikator telah dapat mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat pula indikator yang belum tercapai dan masih belum ada hasil dalam perjanjian kinerja, akan tetapi secara keseluruhan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2024 dapat dikatakan tercapai.

Berikut ini adalah hasil pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2024 sebagai berikut :

1. Indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai capaian kinerja sebesar 98,75 persen dan dikategorikan tidak berhasil;
2. Indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai capaian sebesar 100,28 persen dan dikategorikan berhasil;
3. Indikator Angka Kemiskinan dengan nilai capaian kinerja sebesar 106,28 persen dan dikategorikan berhasil;
4. Indikator Indeks Gini belum terdapat capaian, karena belum ada rilis resmi dari BPS;
5. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan nilai capaian kinerja sebesar 112,02 dan dikategorikan berhasil;
6. Indikator Indeks Resiko Bencana dengan capaian kinerja sebesar 112,02 persen dan dikategorikan berhasil;





BAB 4

PENUTUP

7. Indikator Persentase Infratraktur Dalam Kondisi Mantap dengan capaian kinerja sebesar 101,85 persen dan dikategorikan berhasil;
8. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja sebesar 108 persen dan dikategorikan berhasil
9. Indikator Nilai SAKIP dengan capaian kinerja sebesar 90,86 persen dan dikategorikan tidak berhasil;
10. Indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda belum terdapat capaian, karena belum ada rilis resmi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);
11. Indikator Jumlah Desa Mandiri dengan capaian kinerja sebesar 100 persen dan dikategorikan berhasil;
12. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja sebesar 91,32 persen dan dikategorikan tidak berhasil.

Pencapaian target kinerja dilaksanakan melalui program dan kegiatan serta anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yang berjumlah sebesar Rp. 1.346.806.562.394 dan dapat direalisasikan sebesar 1.141.997.280.016 atau 87,49 persen.

Beberapa hal yang mempengaruhi hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024 antara lain :

1. Ketidaktentuan kondisi perekonomian global (perang ukraina-rusia, ancaman resesi, dll), nasional dan lokal yang masih cukup mempengaruhi sektor perekonomian.
2. Kondisi infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung perekonomian dan peningkatan daya saing daerah, guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas.
3. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPM sehingga berakibat belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terhadap sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
4. Rendahnya produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan akibat rendahnya penggunaan bibit unggul bersertifikat.
5. Belum optimalnya sarana prasarana dan teknologi pertanian.





BAB 4

PENUTUP

6. Kerusakan/pencemaran lingkungan, bencana alam dan dampak perubahan iklim.
7. Masih minimnya diversifikasi pangan Masyarakat.
8. Belum optimalnya hilirisasi industri/industrialisasi terhadap komoditi primer (sektor ekonomi basis) dengan memanfaatkan bonus demografi.
9. Belum optimalnya pembangunan ekonomi kawasan (keunggulan kompetitif /daya saing serta keunggulan komparatif Kawasan.

4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Kedepan

Pemerintah Kabupaten Sambas terus berupaya dalam perbaikan kinerja kedepan dengan melakukan beberapa perbaikan antara lain :

1. Komponen perencanaan kinerja

Perbaikan kinerja yang dilakukan pada komponen perencanaan kinerja antara lain :

- a) Melakukan identifikasi indikator-indikator pada level indikator sasaran maupun program yang tidak memenuhi kriteria Spesifik, Measurable, Achievable, Relevance, Tomebound (SMART) dan cukup, namun perbaikan hanya dapat dilakukan penyempurnaan pada dokumen RKPD atau Renja tahunan dikarenakan Tahun 2024 ini adalah Tahun akhir periode RPJMD dan tahun serentak penyusunan dokumen perencanaan daerah baik RPJPD dan RPJMD. Adapun indikator yang dilakukan perbaikan antara lain :
 - 1) Sasaran meningkatnya kesempatan kerja dilakukan perbaikan menjadi menurunnya tingkat pengangguran.
 - 2) Sasaran meningkatnya pengelolaan perlindungan terhadap bencana dilakukan perbaikan menjadi meningkatnya ketahanan terhadap bencana.
 - 3) Sasaran meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah dilakukan perbaikan menjadi meningkatnya kualitas infrastruktur.





BAB 4

PENUTUP

- 4) Membuat sasaran baru yaitu menurunkan tingkat kemiskinan untuk mengukur indikator angka kemiskinan dan indeks gini.
 - b) Pada Tahun 2025 akan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan pohon kinerja Tingkat Kabupaten dan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memasikan pohon kinerja telah mempertimbangkan CSF dalam setiap penjabaran antar tingkat kinerja sehingga pencapaian kinerja di atas akan dipengaruhi oleh tingkat kinerja dibawahnya. Setelah itu, melakukan identifikasi kembali *crosscutting* kinerja yang melibatkan keseluruhan perangkat daerah.
2. Komponen Pengukuran Kinerja
Perbaikan kinerja yang dilakukan pada komponen pengukuran kinerja antara lain :
 - a) Melakukan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemanfaatan Aplikasi e-SAKIP sebagaimana PKS Nomor : 02/TKKSD-TAPEM/PKS/2025 dan Nomor 100.2.2.3/02/SKU/RO-PEM. Aplikasi yang direplikasi akan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas sehingga akan terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja melalui data SIPD.
 - b) Melakukan Asistensi Penyusunan Indikator Kinerja Kabupaten dan PD dan memastikan bahwa seluruh IKU harus memuat definisi operasional dan formalisasi perhitungan.
3. Komponen Pelaporan Kinerja.
Perbaikan kinerja yang dilakukan pada komponen pelaporan kinerja antara lain :
 - a) Pelaporan Kinerja telah dijadikan dasar dalam menetapkan strategi perencanaan kinerja pada tahun berikutnya sehingga target kinerja lebih realistis dan SMART. Adapun target kinerja yang dilakukan penyesuaian antara lain :





BAB 4

PENUTUP

- 1) Pertumbuhan Ekonomi dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 dari 4,05 menjadi 4,8 dikarenakan realisasi pada Tahun 2023 telah melebihi target yang ditentukan yaitu 4,69.
 - 2) Indeks Pembangunan Manusia dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 dari 69,27 menjadi 71 dikarenakan penyesuaian perhitungan yang menggunakan SP 2020.
 - 3) Jumlah Desa Mandiri dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 dari 95 desa menjadi 189 desa dikarenakan realisasi pada Tahun 2023 telah melebihi target yang ditentukan yaitu 168 desa.
 - 4) Tingkat Pengangguran Terbuka lakukan penyesuaian target pada tahun 2024 dari 2,97 menjadi 5,0 dikarenakan realisasi pada Tahun 2023 jauh dari capaian target yang ditentukan yaitu 5,04.
 - 5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan penyesuaian target pada tahun 2024 dari 66 menjadi 73,98 dikarenakan realisasi pada Tahun 2023 telah melebihi target yang ditentukan yaitu 71,31.
- b) Melakukan asistensi penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan seluruh Laporan Kinerja Perangkat Daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dengan wajib memuat :
- 1) Membandingkan target dan realisasi kinerja
 - 2) Analisis efisiensi anggaran
 - 3) Membandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya
 - 4) Membandingkan realisasi kinerja dengan beberapa tahun terakhir.
 - 5) Membandingkan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD dan Target Nasional (jika ada)
 - 6) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja
 - 7) Upaya yang dilakukan dalam peningkatan capaian kinerja.
4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Perbaiki kinerja yang dilakukan pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal antara lain :
- a) Memberikan dan mempertajam temuan serta rekomendasi yang lebih mendetil berdasarkan checklist kelengkapan dokumen pada Kertas





BAB 4

PENUTUP

Kerja Evaluasi (KKE) sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat memberikan solusi perbaikan yang nyata dan efektif terkait hal-hal yang menjadi kekurangan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

- b) Melakukan ekspose dengan memanggil PD terkait hasil dari evaluasi AKIP PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Sambas
- c) Mendorong agar PD menindaklanjuti rekomendasi serta saran perbaikan atas hasil evaluasi AKIP.

Dalam rangka mencapai kinerja pada tema dan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 yakni “Peningkatan Ekonomi Inklusif, Daya Saing Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan Kabupaten Sambas yang berkemajuan”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekonomi daerah melalui peningkatan produktifitas pertanian dan sinergi pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja sebagai upaya pengurangan kemiskinan serta meningkatkan daya saing daerah.
2. Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas, dan berdaya saing yang didukung dengan peningkatan digitalisasi administrasi pemerintahan.
3. Menyelaraskan program prioritas tahun 2024 dengan 9 program unggulan daerah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, antara lain :
 - a) Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang didukung dengan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan (selaras dengan Program Unggulan Daerah OVOP, Tema Sipindu, Rusimah dan Green Growth).
 - b) Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 0% (selaras dengan Program Unggulan Daerah OVOP dan Pemuda Siap Kerja).





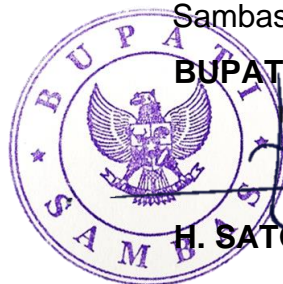
BAB 4

PENUTUP

- c) Program Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (selaras dengan Program Unggulan Daerah Pemuda Siap Kerja).
- d) Program Pembangunan Perbatasan (selaras dengan Program Unggulan Daerah OVOP).

Sambas, Maret 2025

BUPATI SAMBAS



H. SATONO, S.Sos.I., M.H.



Lampiran



BUPATI SAMBAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **H. SATONO, S.Sos, I.M.H.**

Jabatan : **BUPATI SAMBAS**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sambas, 8 Juli 2024


BUPATI SAMBAS,

H. SATONO, S.Sos, I.M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4.8
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71
3.	Menurunnya Angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	6.94
		Indeks Gini	0.268
4.	Menurunnya Tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0
5.	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	150,72
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	73,1
7.	Meningkatnya kualitas dan tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		Nilai SAKIP	BB
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP
8.	Meningkatnya status kemajuan desa	Jumlah Desa Mandiri	189
9.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,98

No.	Program	Anggaran
1	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	3.376.750.408,00
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	10.000.000,00
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	40.000.000,00
4	Program Pengembangan Ekspor	176.392.879,00
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.658.156.000,00
6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	339.736.653,00
7	Program Stabilitasii Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.533.606.541,00
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.375.230.731,00
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	31.728.180.918,00
10	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	373.280.494,00
11	Program Perizinan Usaha Pertanian	603.017.841,00
12	Program Penyuluhan Pertanian	2.114.699.178,00
13	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.410.686.436,00
14	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.773.299.996,00

No.	Program	Anggaran
15	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	199.998.368,00
16	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	679.833.056,00
17	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.635.359.539,00
18	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	381.150.000,00
19	Program Perizinan Usaha Pertanian	603.017.841,00
20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.103.149.888,00
21	Program Pemasaran Pariwisata	625.925.382,00
22	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	99.999.972,00
23	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	189.999.932,00
24	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	113.711.816,00
25	Program Promosi Penanaman Modal	46.000.224,00
26	Program Pelayanan Penanaman Modal	314.000.000,00
27	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	486.287.960,00
28	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	65.000.000,00
29	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	51.000.000,00
30	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	117.000.000,00
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	316.358.544,00
31	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	170.303.864,00
32	Program Pengembangan UMKM	484.143.900,00
33	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	830.696.140,00
34	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	58.076.762,00
35	Program Rehabilitasi Sosial	640.256.362,00
36	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	950.754.861,00
37	Program Penanganan Bencana	501.725.936,00
38	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	101.044.953,00
39	Program Pemberdayaan Sosial	448.155.241,00
40	Program Pengembangan Kurikulum	247.346.846,00
41	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.666.779.740,00
42	Program Pengelolaan Pendidikan	166.905.362,00
43	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	285.894.684.585,00
44	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	372.332.744,00
45	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.539.503.603,00
46	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.897.144.785,00
47	Program Pembinaan Perpustakaan	3.189.823.588,00
48	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	34.132.850,00

No.	Program	Anggaran
49	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	375.999.795,00
50	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000,00
51	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.900.231.164,00
52	Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	134.366.573,00
53	Program Perlindungan Perempuan	263.724.730,00
54	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	13.885.116,00
55	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	291.483.933,00
56	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	113.606.800,00
57	Program Perlindungan Khusus Anak	241.051.974,00
58	Program Pengendalian Penduduk	440.496.086,00
59	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.604.133.934,00
60	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.256.639.918,00
61	Program Perencanaan Tenaga Kerja	49.562.804,00
62	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.484.601.058,00
63	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.669.836.140,00
64	Program Hubungan Industrial	401.499.423,00
65	Program Penanggulangan Bencana	1.806.641.938,00
66	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.239.997.705,00
67	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.720.000.729,00
68	Program Penyelenggaraan Jalan	202.149.772.429,00
69	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.339.669.346,00
70	Program Penataan Bangunan Gedung	10.588.107.094,00
71	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.722.341.400,00
72	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	49.735.294.094,00
73	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	28.596.118.833,00
74	Program Pengelolaan Pelayaran	2.838.338.588,00
75	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	30.532.848.017,00
76	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	300.658.200,00
77	Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase	11.411.370.770,00
78	Program Pengembangan Permukiman	11.351.901.936,00
79	Program Pengembangan Perumahan	244.234.698,00
80	Program Kawasan Permukiman	3.137.274.453,00
81	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	991.301.385,00
82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.233.433.325,00
83	Program Perekonomian dan Pembangunan	3.699.999.363,00
84	Program Pengelolaan Perbatasan	74.999.979,00

No.	Program	Anggaran
85	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	33.034.214.471,00
86	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18.294.475.939,00
87	Program Kepegawaian Daerah	2.033.497.943,00
88	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	569.018.797,00
89	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.609.199.837,00
90	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.308.599.790,00
91	Program Pendaftaran Penduduk	2.042.149.824,00
92	Program Pencatatan Sipil	670.001.648,00
93	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.360.280.291,00
94	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	99.999.524,00
95	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.453.867.332,00
96	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	850.830.521,00
97	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	341.309.903,00
98	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	184.491.208,00
99	Program Pengelolaan Arsip	141.601.970,00
100	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	550.000.000,00
101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.980.903.752,00
102	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	871.764.402,00
103	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.856.573.340,00
104	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	732.480.576,00
105	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.755.762.477,00
106	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	315.237.404.070,00
107	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.677.098.344,00
108	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.905.975.037,00
109	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.399.033.602,00
110	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	552.932.108,00
111	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	218.919.757,00
112	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	405.079.560,00
113	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	351.499.569,00
114	Program Penataan Desa	,00
115	Program Peningkatan Kerjasama Desa	24.999.690,00
116	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.289.910.032,00
117	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.474.359.471,00
118	Program Pengelolaan Persampahan	10.078.650.219,00
119	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	424.914.965,00

No.	Program	Anggaran
120	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	29.000.000,00
121	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.515.718.797,00
122	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	252.143.707,00
123	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	350.000.000,00
Jumlah Keseluruhan		Rp 1.241.175.713.982,00

Sambas, 8 Juli 2023



BUPATI SAMPAS,

H. SATONO, S.Sos.I.,M.H.

**PENGUKURAN KINERJA
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah	1. Pertumbuhan Ekonomi	-	4,8	4,74	98,75%
2.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	71	71,20	100,28%
3.	Menurunnya angka kemiskinan	3. Angka Kemiskinan	-	6,94	6,53	106,28%
		4. Indeks Gini	-	0,268	N/A	N/A
4.	Menurunnya tingkat pengangguran	5. Tingkat Pengangguran Terbuka	-	5,0	4,99	100,20%
5.	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	6. Indeks Resiko Bencana	-	150,72	134,55	112,02%
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	7. Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	%	73,10	74,45	101,85%
7.	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70 (BB)	75.6 (BB)	108%
		9. Nilai SAKIP	Nilai	70 (BB)	63,60 (B)	90,86%
		10. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	Opini	WTP	N/A	N/A
7.	Meningkatnya Status Kemajuan Mandiri	11. Jumlah Desa Mandiri	Desa	189	189	100%
8.	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	73,98	67,56	91,32%



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Jl. Pembangunan Sambas Nomor 82, Kec. Sambas, Sambas, Kal-Bar (79462)
Telp. (0562) 392454 Fax. (0562) 392443 Pos-el : setda.kab.sbs@gmail.com
Laman : www.sambas.go.id